



GAPKI

NEWS



Sawit Merdeka dan Berdaulat

Pembaca yang budiman,

Baru saja kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 dengan penuh syukur dan hikmat sekaligus bersuka cita. Tanpa adanya kemerdekaan, tidaklah mungkin kita menikmati kehidupan seperti sekarang. Karena itu, ungkapan syukur sudah sepantasnya kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Apalagi penerbitan *GAPKI News* edisi September 2024 ini sudah rampung sehingga dapat dinikmati oleh pembaca yang budiman.

Kemerdekaan dan kedaulatan tidak hanya berlaku untuk kita sebagai anak bangsa, namun juga untuk komoditas kelapa sawit. Apalagi produk andalan ekspor Indonesia ini terbukti memiliki kontribusi besar bagi masyarakat dan negara. Kemerdekaan dan kedaulatan sawit harus kita wujudkan dalam bentuk kemandirian yang hakiki, berpijak pada undang-undang yang memberikan perlindungan maksimal kepada komoditas sawit.

Berangkat dari kebutuhan masa kini dan masa depan, *GAPKI News* edisi September 2024 menjadikan kedaulatan sawit sebagai laporan utama. Sekarang adalah momentum penting karena pembahasan RUU Komoditas Strategis sedang berjalan. Sebagai pelaku usaha sawit, GAPKI berkepentingan agar undang-undang yang disahkan nanti mampu menjawab masalah yang selama ini belum terpecah oleh undang-undang yang ada.

Sejalan dengan partisipasi GAPKI dalam pembahasan RUU Komoditas Strategis, penguatan organisasi melalui berbagai program kerja terus berjalan, baik di tingkat pusat atau cabang. Beberapa isu krusial seperti percepatan sertifikasi ISPO, pengurusan izin HGU dan kebijakan FPKM, akselerasi PSR hingga menggali potensi pasar-pasar baru di luar negeri terus berjalan. Semua program ini memiliki tujuan besar yakni mewujudkan sawit berkelanjutan.

Kita berharap publikasi program kerja GAPKI melalui buletin ini semakin menumbuhkan optimisme dan menjadi inspirasi untuk kebaikan kita bersama di masa depan. Semoga apa yang disajikan dalam *GAPKI News* edisi September 2024 ini menjadi vitamin anggota GAPKI dalam mengelola usaha dan menjalankan roda organisasi. Selamat membaca. ■

Salam,
Redaksi GAPKINews

GAPKINews

Media Komunikasi dan
Informasi Anggota GAPKI

PENERBIT
GAPKI Pusat

PEMBINA
Eddy Martono
Sany Anthony
Susanto Yang
Satrija B. Wibawa
M. Hadi Sugeng
Mona Surya

PENGARAH
Mukti Sardjono

TIM AHLI
Para Ketua Bidang
Pengurus Pusat GAPKI

PENANGGUNG JAWAB
Fenny Sofyan

Dewan Redaksi
Yudha Negara Nyoman
Indah Permata Soegyarto
Ratri Melanda Maharani
Dyah Laras Wulandari
Susan Sri Rahayu
Eko Tamba

ALAMAT
Kantor GAPKI Pusat
Sudirman Park Blok B-18
Jalan KH Mas Mansur Kav. 35
Jakarta 10220

(+62) 21-5794-3871
gapki@gapki.id | gapkipusat@
yahoo.com



China Dukung Ekspor Minyak Sawit dari Indonesia.....	11
Salam Redaksi.....	2
Daftar Isi.....	3
Meresapi Makna Perayaan Kemerdekaan Indonesia.....	4
Perjuangkan Keberlanjutan Sawit, GAPKI Terima Medbun Awards 2024.....	5
Menuju Kedaulatan Sawit.....	6,7
Sawit Jadi Sektor Prioritas Dalam RUU Komoditas Strategis.....	8
Sejarah Baru, Indonesia Resmikan Ujicoba B50.....	9
Kerjasama GAPKI, USDOL dan ILO Jadi Percontohan Sawit Dunia.....	10
Pemerintahan Baru Diyakini Perkuat Daya Saing Sawit.....	12
Percepat HGU, Kementerian ATR/BPN Siapkan Terobosan.....	13
Bimbingan Teknis Pengurusan IUP, HGU, dan Implementasi FPKMS.....	14
Ombudsman Dalam Aturan Lahan, Perizinan, dan Tata Niaga Sawit.....	15



Kontribusi GAPKI dalam
Penanganan Ganoderma..... 16



Peta Jalan Membebaskan
Indonesia dari Pekerja Anak.... 17



DPR Diminta Lobi Parlemen
Uni Eropa Tunda EUDR..... 18

Hindari Multitafsir, GAPKI dan PWI Sosialisasikan FPKM.....	19
GAPKI dan Asosiasi Produsen CPO Nigeria Jalin Kerjasama.....	20
GAPKI Minta Pemerintah Tegas Soal POME dan PAO.....	21
Pemerintah Dorong Perusahaan Sawit Gabung GAPKI.....	22
GAPKI Paparkan Kunci Sukses Hilirisasi Produk Sawit.....	23
Mempercepat Realisasi Sertifikasi ISPO di Kalimantan Tengah.....	24
GAPKI Minta CPO Dikecualikan Dalam Sertifikasi Halal.....	25
Pejabat Gubernur Sumsel Respon Positif Masukan GAPKI.....	26
GAPKI Sumsel Dorong Anggota Raih PROPER Hijau.....	27
GAPKI Kalbar Fokus Kembangkan Kapasitas SDM Sawit.....	28
Rakercab GAPKI Kalteng Tekankan Program Keberlanjutan.....	29
GAPKI Kaltim Perkuat Soliditas dan Sinergitas.....	30
Pahami Hak-haknya, Lindungi Pekerjaannya.....	31
Mengenalkan Kebaikan Kelapa Sawit Sejak Dini.....	32
GAPKI Bersatu, Sawit Maju.....	33
Produksi CPO Turun, Ekspor Justru Naik.....	34
Jangan Terlena dengan Kejayaan Kelapa Sawit.....	35

MERESAPI MAKNA PERAYAAN KEMERDEKAAN INDONESIA

Komoditas sawit harus merdeka dan berdaulat untuk mewujudkan impian dan harapannya.

Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan sekaligus kebahagiaan. Setiap elemen masyarakat di bumi Nusantara pasti merasakan suasana ceria, suka cita, dan meriah. Jangan heran kalau kemeriahan merayakan hari kemerdekaan Indonesia itu berlangsung di banyak tempat dari jalan dan gang di perkotaan, kampung dan dusun, perkebunan, dan perkantoran. Suasana meriah itu juga terjadi dalam Syukuran Kemerdekaan Indonesia ke-79 di Kantor GAPKI pada 16 Agustus 2024.

Syukuran Kemerdekaan Indonesia di Kantor GAPKI ini diikuti oleh beberapa pengurus antara lain Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, Sekretaris Jenderal GAPKI M. Hadi Sugeng, Wakil Ketua Umum II Susanto, Wakil Ketua Umum III Satrija B. Wibawa, anggota Dewan Pembina Joko Supriyono, Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono, Ketua Bidang Hub. Pemerintah & Antar Lembaga Arief Susanto, Sekretariat GAPKI dan karyawan lain yang bertugas di Kantor GAPKI Pusat di Jakarta.

Perayaan Kemerdekaan Indonesia ke-79 ini berlangsung hikmat, penuh dengan semangat kekeluargaan, dan tentu saja nuansa merah putih yang menjadi ciri khas setiap perayaan hari ulang tahun negeri tercinta ini. Tema besar perayaan HUT ke-79 dengan tema besar Nusantara Baru, Indonesia Maju ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi insan-insan GAPKI untuk terus berkontribusi kepada industri sawit dan bangsa Indonesia.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menegaskan bahwa komoditas sawit harus dikawal dan dijaga oleh seluruh pemangku kepentingannya. Salah satu masalah yang harus mendapat perhatian serius adalah masalah produktivitas sawit yang stagnan dalam beberapa tahun belakangan ini. Padahal, kebutuhan pasar dalam negeri dan luar negeri meningkat. Karena itu, GAPKI berkomitmen mendukung pelaksanaan program PSR.

Bagi pengusaha sawit, permintaan sawit untuk ketahanan pangan dan kemandirian energi serta pemenuhan pasar ekspor adalah peluang. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah



ringan karena bersumber dari internal dan eksternal. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menegaskan tantangan harus dijawab bersama oleh dunia usaha, pemerintah, maupun elemen lain yang berkepentingan dengan sektor sawit.

Melalui perayaan Kemerdekaan Indonesia ke-79, GAPKI mengajak meningkatkan soliditas, kebersamaan, dan merapatkan barisan supaya masa depan industri kelapa sawit semakin bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa. Karena itu, komoditas sawit harus merdeka dan berdaulat untuk mewujudkan impian dan harapannya. ■





PERJUANGKAN KEBERLANJUTAN SAWIT, GAPKI TERIMA MEDBUN AWARDS 2024

*Semakin besar kontribusi setiap pelaku sawit,
maka semakin besar manfaat yang didapat negara
dan masyarakat.*

Kiprah dan kontribusi GAPKI dalam memperjuangkan keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Penghargaan terbaru diberikan oleh *Media Perkebunan* dalam perayaan ulang tahun yang ke-27. GAPKI mendapatkan apresiasi *Medbun Awards 2024* untuk Kategori Organisasi yang Memperjuangkan Keberlanjutan Sawit Indonesia.

Penyerahan *Medbun Award 2024* untuk GAPKI dilakukan oleh Anggota Dewan Pakar Media Perkebunan, Agus Pakpahan kepada Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono. Selain GAPKI, ada 15 pelaku industri sawit yang menerima apresiasi sesuai dengan kiprah masing-masing. Penyerahan *Medbun Awards 2024* dilakukan

bersamaan dengan *Technology & Talent Palm Oil Mill Indonesia (TPOMI) Conference and Exhibition 2024* di Bandung pada 18-19 Juli 2024.

Penilaian atas kontribusi penerima anugerah ini dilakukan oleh dewan juri yang terdiri dari anggota Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia (P3PI) dan diketuai oleh Karyudi selaku Dewan Pakar Media Perkebunan. Dewan juri menetapkan nominasi penghargaan untuk individu, organisasi, dan perusahaan sawit yang membawa pengaruh baik dan bermanfaat bagi Indonesia. Sebanyak 15 pelaku dinilai layak menerima *Medbun Awards 2024*.

Di depan 300 orang undangan yang hadir, Dirjen Perkebunan Kementan Andi Nur Alam Syah mengatakan



penghargaan ini merupakan bukti kontribusi konkret para penerima apresiasi. Ajang ini diharapkan menjadi motivasi bagi pihak lain untuk meningkatkan kontribusi nyata dalam pengembangan dan keberlanjutan industri sawit nasional. Semakin besar kontribusi setiap pelaku sawit, maka semakin besar manfaat yang didapat negara dan masyarakat.

Dirjenbun Andi Nur Alam Syah menegaskan sawit berkontribusi cukup besar sebagai sumber devisa ditengah fenomena El Nino. Komoditas masih bertahan sebagai penyumbang devisa negara dari sektor pertanian khususnya perkebunan. Di sisi lainnya, industri ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menciptakan kemandirian energi menggantikan bahan bakar fosil melalui biodiesel dan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Namun, industri sawit selalu dihadapkan dengan berbagai tantangan dan menjadi sorotan dunia. Tantangan dari dalam adalah upaya meningkatkan produksi dan produktivitas sawit. Sedangkan tantangan dari luar khususnya dalam bentuk kampanye negatif tentang produksi minyak sawit Indonesia yang terkait dengan isu persaingan ekonomi dengan minyak nabati lainnya di pasar dunia, isu sosial dan pembangunan pedesaan. ■



MENUJU KEDAULATAN SAWIT

***Sawit harus berdaulat
agar ketahanan pangan
dan kemandirian
energi nasional dapat
diwujudkan.***



Ketika bangsa Indonesia memperingati HUT ke-79 kemerdekaan pada 17 Agustus 2024, usia kelapa sawit secara komersial sudah 113 tahun. Angka ini ditandai dari pertama kali sawit ditanam secara komersial di Sungai Liput (Aceh) dan Pulu Raja (Sumatera Utara) pada 18 November 1911. Kalau ditarik lebih jauh lagi, usia sawit di Indonesia mencapai 176 tahun yang dihitung sejak empat benih sawit dari Mauritius ditanam pertama kali di Kebun Raya Bogor oleh Dr. D. T. Pryce pada 1848. Inilah cikal bakal berkembangnya kelapa sawit di Indonesia.

Seiring dengan perjalanan usianya, kontribusi kelapa sawit kepada Indonesia juga semakin signifikan. Sepanjang 2023, industri sawit memberikan nilai ekspor sebesar US\$ 30,32 miliar atau pendapatan devisa lebih dari Rp. 500 triliun. Pendapatan devisa ekspor itu berasal dari volume ekspor sekitar 32,21 juta ton. Industri sawit juga memberikan peluang kerja kepada 16,2 juta pekerja langsung di sektor *on farm* maupun *off farm* serta 22 juta pekerja tidak langsung. Sawit juga berperan vital dalam program pangan dan energi nasional, salah satunya dengan mengkonversi minyak sawit menjadi bahan bakar nabati.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan kontribusi sawit kepada negara berasal dari sekitar 3.000-an perusahaan sawit, 745 di antaranya anggota GAPKI. Kontribusi sawit yang signifikan didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa

Sawit (BPDPKS). Badan yang dibentuk pada 10 Juni 2015 ini mampu mendukung program bioenergi, yaitu dengan memberikan subsidi biodiesel. Dengan subsidi ini, harga minyak sawit yang di awal program biodiesel sangat rendah, harga minyak sawit dan TBS relatif tinggi saat ini. Pemerintah juga dapat menghemat devisa dari impor minyak bumi. Untuk meningkatkan produktivitas ini, BPDPKS mendapat amanah membiayai program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari semula Rp 30 juta menjadi Rp 60 juta/ha lahan mulai 2024.

Sebagai badan layanan umum yang menghimpun dana dari pungutan ekspor CPO dan juga menyalurkan dana untuk peningkatan kinerja industri sawit secara berkelanjutan, BPDPKS dipandang mampu mendorong pengembangan industri sawit. Untuk itu, pemerintah akan menambah tugas BPDPKS tidak hanya untuk komoditas kelapa sawit, tetapi diperluas dengan komoditi kelapa dan kakao. Penambahan tugas ini merupakan bukti sahih betapa vital peranan Badan Pengelola Komoditas dalam pengembangan komoditas perkebunan di Indonesia secara luas.

Kontribusi sawit bukan lagi sekadar sumber devisa dan penyedia pangan minyak goreng dan produk turunannya. Pemerintah secara tegas menjadikan sektor sawit sebagai kekuatan membangun tidak hanya untuk ketahanan pangan, namun juga kemandirian energi. Inovasi pengembangan minyak sawit menjadi bahan bakar nabati (biodiesel maupun

SAF) sejak dua dekade silam kini mulai berbuah. Sawit merupakan bahan baku energi terbarukan yang sangat penting bagi Indonesia yang merupakan produsen terbesar di dunia.

Dimulai pada 2008, mandatori biodiesel sebesar 2,5% (B2,5) lalu meningkat 7,5% (B7,5) pada 2010. Ujicoba biodiesel dari minyak sawit ini memberi harapan besar bagi Indonesia. Ketergantungan terhadap impor BBM mulai dikurangi seiring keberhasilan program ini. Sepanjang 2023, mandatori biodiesel sukses menghemat devisa negara hingga US\$ 7,9 miliar. Tak heran jika pemerintah terus berupaya meningkatkan penggunaan biodiesel dari minyak sawit dengan melakukan *soft launching* ujicoba Biodiesel B50 di Balulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada 18 Agustus 2024.

Peresmian biodiesel B50 merupakan sejarah bagi industri sawit dan bangsa Indonesia. Fase ini merupakan momentum penting untuk mencapai kemandirian energi di mana bahan bakar yang digunakan lebih banyak menggunakan minyak sawit. Peristiwa ini disambut positif oleh GAPKI yang berperan sebagai pemasok bahan baku dalam mata rantai program biodiesel. Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono mengatakan produksi sawit tahun ini masih cukup untuk program biodiesel B50.

Namun, GAPKI memberikan catatan penting supaya kebutuhan untuk B50 dapat terpenuhi. Upaya yang

harus dilakukan adalah produktivitas minyak sawit yang harus ditingkatkan. Peningkatan produktivitas kebun sawit perusahaan dilakukan antara lain melalui peremajaan tanaman dengan klon-klon unggul, pengelolaan kebun yang baik/GAP serta pengembangan dan mendatangkan sumber daya genetik baru tanaman sawit.

Upaya peningkatan produktivitas sudah mulai dilakukan oleh beberapa anggota GAPKI yang berhasil mengembangkan varietas bibit dengan potensi panen hingga 40 ton TBS/Ha, jauh di atas produktivitas nasional 20 ton TBS/Ha. Program ini sukses dijalankan di beberapa kebun perusahaan dan kebun petani plasmanya. GAPKI yang dimotori oleh Bidang Riset dan Pengembangan serta didukung oleh BPDPKS, saat ini sedang mendatangkan sumber daya genetik (SDG) baru dari negara asal kelapa sawit yaitu Afrika. Dengan SDG baru, diharapkan segera dihasilkan klon-klon unggul baru kelapa sawit dengan produktivitas yang lebih tinggi.

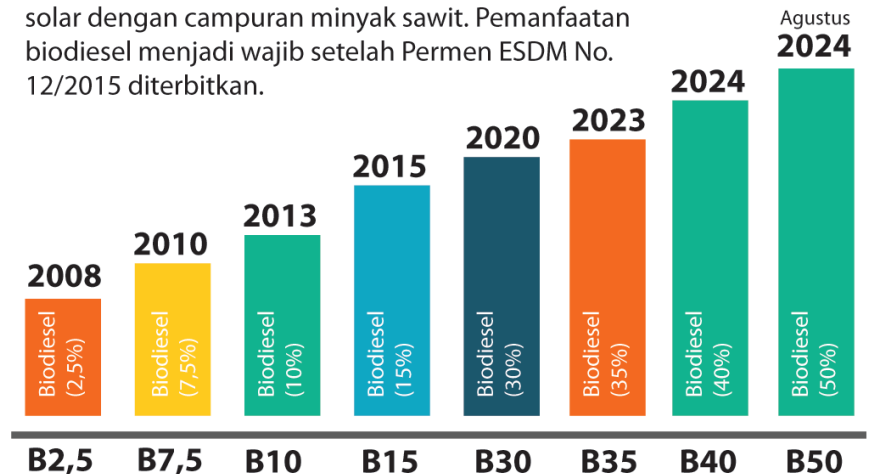
Selain itu, peremajaan sawit rakyat (PSR) harus lebih dioptimalkan karena dapat berdampak langsung terhadap produktivitas sawit nasional. Program yang dimulai pada 2017 ini punya target meremajakan 540 ribu hektar lahan sawit rakyat. Program ini vital karena luas kebun sawit rakyat mencapai 6,21 juta hektar atau 40,51% dari total kebun sawit nasional.

Pemerintah dengan dukungan dana BPDPKS melakukan program PSR untuk tanaman sawit rakyat yang sudah tidak produktif (tanaman tua dengan produktivitas kurang dari 10 ton TBS/Ha). Dengan kebijakan pemerintah menaikkan pendanaan program PSR dari Rp 30 juta/Ha menjadi Rp 60 juta/Ha mulai 1 September 2024, diharapkan dapat meningkatkan percepatan program PSR. Pekerjaan rumah memang masih banyak untuk diperbaiki seperti persyaratan PSR yang dirasakan terlalu rumit serta adanya indikasi kebun sawit rakyat yang masuk atau dmasukan dalam kawasan hutan.

Peningkatan produksi sawit tidak hanya untuk pemenuhan CPO dalam negeri seperti untuk kebutuhan

Mandatori Biodiesel

Mandatori biodiesel bermula dari Inpres No. 1/2006 tentang percepatan pemanfaatan biodiesel, yakni solar dengan campuran minyak sawit. Pemanfaatan biodiesel menjadi wajib setelah Permen ESDM No. 12/2015 diterbitkan.



pangan, kebutuhan energi, industri oleokimia sawit, namun juga kepentingan ekspor. Selama ini, sawit merupakan komoditas nonmigas andalan ekspor Indonesia. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan minyak sawit dalam negeri dan ekspor, pemerintah perlu mengembangkan kebun sawit untuk energi (dedicated area) khususnya di kawasan yang sudah terdegradasi. Dengan demikian, kebutuhan minyak sawit untuk energi tidak akan mengganggu kebutuhan pangan, industri dalam negeri dan ekspor.

Menurut Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, peningkatan produktivitas sawit memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Pada usianya saat ini, sawit bukan lagi tanaman hias seperti satu abad silam. Kelapa sawit telah berubah menjadi sandaran dan hajat hidup orang banyak sehingga membutuhkan perlindungan undang-undang yang semakin solid. Puluhan juta rakyat Indonesia bergantung pada industri sawit maupun produk turunannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan peranan yang signifikan ini, sawit bukanlah komoditas biasa bagi bangsa Indonesia, namun bertransformasi menjadi komoditas yang sangat strategis. Tingkat kemanfaatan sawit tidak lagi hanya ekonomi, namun mencakup setiap aspek kehidupan bangsa. Bukan sekadar sawitnya, namun juga

limbahnya memberi manfaat besar bagi kehidupan. Intinya tidak ada sejengkal pun dari sawit yang tidak termanfaatkan untuk kehidupan manusia.

Berangkat dari kondisi ini GAPKI berpartisipasi aktif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Komoditas Strategis yang dibahas di Badan Legislasi DPR. Undang-undang ini diharapkan menjadi pondasi tata kelola industri sawit yang lebih baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan nasional serta mengantisipasi tantangan masa kini dan masa depan. Bagi dunia usaha, kepastian hukum dan kepastian berusaha mutlak diperlukan sebagai pedoman berusaha secara berkelanjutan. Undang-undang ini diharapkan menjadi solusi atas tumpang tindih regulasi dan banyaknya institusi yang terkait dengan industri sawit.

Potensi sawit masih sangat besar. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak kalah besar, terlebih setelah Uni Eropa menerapkan EUDR mulai awal tahun depan. Dengan bekal undang-undang yang kuat, pemerintah dan pelaku industri sawit memiliki landasan yang tegas dalam menyikapi kampanye negatif dari dalam dan luar negeri. Di usianya saat ini, kelapa sawit harus berdaulat dan menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia agar ketahanan pangan dan kemandirian energi nasional dapat diwujudkan. ■



SAWIT JADI SEKTOR PRIORITAS DALAM RUU KOMODITAS STRATEGIS

Diperlukan satu badan yang menangani satu komoditas.

Ketika Baleg DPR meminta GAPKI memberi masukan tentang RUU Komoditas Strategis dalam rapat virtual pada 4 Juli 2024, anggota Dewan Pembina GAPKI Joko Supriyono mengawalinya dengan kalimat ringkas dan padat. “Komoditas sawit sudah *overregulated*,” katanya. Setidaknya ada 37 instansi pemerintah pusat dan daerah yang terlibat dalam urusan sawit. Akibatnya UU Perkebunan tidak memberikan value signifikan karena konteks operasional industri sawit

justu menghadapi UU Kehutanan, Pertanahan, Perdagangan dan lain-lainnya.

RUU yang sedang dibahas ini diharapkan menekan ego sektoral sehingga undang-undang yang dilahirkan nantinya sanggup membela keberlangsungan komoditas strategis, khususnya sawit. Apalagi RUU Kelapa Sawit yang digagas oleh DPR beberapa tahun lalu, tertahan di pemerintah, sehingga tak kunjung disahkan. GAPKI mengusulkan RUU Komoditas dirancang untuk masing-masing komoditas dengan prioritas pertama komoditas kelapa sawit lebih dahulu.

Kelapa sawit perlu didahulukan dan diprioritaskan, karena sangat mendesak dan terkait langsung dengan program ketahanan pangan dan kemandirian energi, kontribusi dan tantangan sawit di masa depan, dan kedaulatan negara sebagai produsen CPO terbesar di dunia. Dengan berfokus pada komoditas sawit, RUU Komoditas diharapkan berdampak besar dalam menyelesaikan masalah di industri sawit sekarang maupun di masa depan. Keterlambatan mengantisipasi tantangan, terutama yang eksternal, dikhawatirkan membuat industri ini stagnan atau bahkan terpuruk.

Menurut Wakil Ketua Umum III GAPKI Satrija B. Wibawa, memayungi 6 komoditas dalam

satu UU membutuhkan upaya lebih besar karena problematika setiap komoditas tidak sama. Waktu yang dibutuhkan juga semakin lama. Padahal regulasi sawit yang mampu mengharmonisasikan regulasi lainnya yang berkaitan sudah sangat mendesak. Tantangan industri sawit tidak hanya dari dalam negeri, namun juga dari luar negeri.

Anggota Dewan Pakar GAPKI, Dr. Sadino mengungkapkan sektor sawit paling mudah dijadikan tertuduh pada beberapa kejadian seperti kebakaran hutan, kerusakan lingkungan, dan lainnya. Padahal sumber masalahnya adalah regulasi yang tidak ditegakkan akibat tumpang tindih yang terjadi. Karena itu, harmonisasi antar regulasi menjadi faktor penting yang harus diakomodasikan dalam RUU Komoditas Strategis ini. Banyaknya instansi yang terlibat jangan sampai menjadikan hambatan pengembangan industri sawit ke depan.

Dalam pembahasan RUU Komoditas Strategis ini, GAPKI memberikan masukan perlunya badan komoditas yang fokus pada komoditas tertentu. Jadi, diperlukan satu badan yang menangani satu komoditas dengan landasan undang-undang sendiri. Dengan demikian, harapan untuk menjadikan sawit sebagai penopang utama perekonomian bangsa segera terwujud. ■



SEJARAH BARU, INDONESIA RESMIKAN UJICoba B50

Ketua Umum GAPKI mengingatkan pentingnya peningkatan produktivitas sawit dalam penerapan B50.

Indonesia mencatat sejarah baru dalam program ketahanan pangan dan kemandirian energi setelah Menteri Pertanian Amran Sulaiman meresmikan Biodiesel B50 di PT Jhonlin Agro Raya, Tbk di Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada 18 Agustus 2024. Ini adalah langkah besar yang menandai kemandirian energi dengan memanfaatkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama energi terbarukan.

Peresmian Biodiesel B50 dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Asisten Khusus Mentah Sjafrie Sjamsoeddin, Wakasad Letjen TNI Tandyo Budi Revita, pemilik PT Jhonlin Agro Raya Andi Syamsudin Arsyad, Ketua Working Group B50 Andi Nur



Alamsyah, dan lain-lain. Sedangkan pengurus GAPKI yang hadir antara lain anggota Dewan Pembina Joko Supriyono, Wakil Ketua Umum I Sany Anthony, Wakil Ketua Umum III Satrija Budi Wibawa, Bendahara Umum Mona Surya, dan Direktur Eksekutif Mukti Sardjono.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan *Soft Launching* Biodiesel B50 merupakan salah satu upaya Indonesia memastikan akses energi yang terjangkau dan ramah lingkungan serta menekan defisit atas perdagangan. Inovasi biodiesel yang sudah dirintis sejak akhir 1980-ini mampu menghemat devisa negara untuk impor solar yang membebani keuangan negara rata-rata Rp 300-400 triliun per tahun. Pemanfaatan minyak sawit untuk biodiesel juga mengurangi ketergantungan terhadap pasar ekspor sawit yang kerap mendapat kampanye negatif.

Bahan bakar biodiesel B50 diproduksi PT Jhonlin Agro Raya ini sudah diujicoba pada kendaraan Toyota Kijang Innova tahun 2018 oleh Menteri Amran. Yang menarik, kendaraan penguji dalam kondisi asli, tidak dilakukan modifikasi mesin atau

selang. Ujicoba dimulai pada Juli 2024 dan telah menempuh jarak 170.891 kilometer. Dari hasil ujicoba terungkap konsumsi B50 rata-rata dapat menempuh 11,82 km per liter.

Sejalan dengan implementasi B50, Ketua Umum GAPKI mengingatkan pentingnya peningkatan produktivitas sawit dalam penerapan B50. Hal ini karena produksi sawit mengalami stagnasi dalam beberapa tahun ini. Produksi sawit saat ini masih mencukupi untuk kebutuhan program B50. Namun, jika permintaan negara importir naik, produksi sawit cukup untuk memenuhi dua kebutuhan sekaligus yakni B50 dan ekspor. Karena itu, realisasi PSR harus dikebut supaya tidak terjadi hambatan dalam menjalankan program B50. ■



KERJASAMA GAPKI, USDOL DAN ILO JADI PERCONTOHAN SAWIT DUNIA

Indonesia dan perusahaan sawitnya diyakini mampu menjadi pemimpin dalam aspek ketenagakerjaan.

Komitmen GAPKI mewujudkan sawit berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045 dijalankan secara berkesinambungan. Salah satunya lewat kerjasama dengan ILO dan U.S. Department of Labor (USDOL) untuk meningkatkan keberlanjutan dari aspek perburuhan. ILO memilih Kabupaten Simalungun sebagai lokasi percontohan sawit dunia untuk program terbaru ILO. Dalam kunjungan ini, USDOL diwakili oleh Carter K Quinley dan Jared Khalil. Sedangkan ILO diwakili Elvis Beytullayev, *Specialist Rural Economist* ILO Genewa.

Kunjungan mereka didampingi Sekretaris Eksekutif JAPBUSI Nursanna Marpaung, Pengawas Ketenagakerjaan Kemenaker Metty, serta Kabid Pengembangan SDM Sumarjono Saragih yang diterima oleh Bupati Simalungun Radiapoh Sinaga. Inisiatif kerjasama antara GAPKI, ILO, dan USDOL ini diberi nama SCOPE SITALASARI, sebagai bagian dari program *Simalungun Marharoon Bolon*. Program ini dimaknai Simalungun Tanah Leluhur Sawit untuk Generasi.

Menurut Kabid Pengembangan SDM Sumarjono Saragih, Simalungun

memang lekat dengan sejarah sawit, terutama kawasan Marihat. Di sinilah berdiri Pusat Penelitian Marihat, cikal bakal Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS). Beberapa benih unggulan dari daerah ini antara lain DXP Marihat dan DXP Simalungun. Rombongan USDOL dan ILO diajak berkunjung ke kantor PPKS di Marihat dan kebun PT Tolan Tiga Indonesia dan PT PP Lonsum Indonesia.

Inisiatif kerjasama ini menjadi percontohan sawit tentang sistem kepatuhan sosial yang mempromosikan kondisi kerja yang layak dan penghapusan kerja paksa di rantai pasok. Kerjasama ini dirintis sejak 2016 ini terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Program ini akan menjadi etalase bagaimana perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang melindungi, menghormati dan mengembangkan pekerja.

Perwakilan USDOL Carter Quinley mengatakan pemerintah Amerika sangat memperhatikan hak-hak buruh di seluruh dunia. Karena itu mereka mencari mitra yang dapat memimpin kondisi perburuhan. Indonesia dan perusahaan sawitnya diyakini mampu menjadi pemimpin dalam aspek ketenagakerjaan.

Selain melindungi dan mengembangkan pekerja, program kerjasama ini diharapkan menjadi lokomotif dalam penghapusan



pekerja anak, kesetaraan gender, kondisi kerja yang layak, kesadaran terhadap K3 serta adanya jaminan sosial. ■





CHINA DUKUNG EKSPOR MINYAK SAWIT DARI INDONESIA

Indonesia diharapkan membuka kantor perwakilan di China untuk promosi komoditas sawit.

China membuka ruang yang sangat besar bagi minyak sawit dari Indonesia seiring dengan meningkatnya kebutuhan minyak nabati di Negeri Panda tersebut. Peluang ini disampaikan oleh *President China Chamber Of Commerce for Import and Export of Foodstuff, Native Produce and Animal By-Product*, Cao Derong kepada delegasi sawit Indonesia dalam The 15th China Int'l Cereals and Oils Conference yang berlangsung di Nanjing, 10-13 Juli 2024.

Delegasi sawit Indonesia terdiri dari sejumlah pelaku dan organisasi di sektor sawit antara lain GAPKI, APOLIN, GIMNI, dan APKASINDO sebagai perwakilan dari kalangan petani kelapa sawit. Beberapa bulan sebelumnya, sejumlah delegasi dagang dari China berkunjung ke beberapa wilayah di Indonesia untuk melihat langsung dan berdialog dengan petani sawit yang tergabung dalam APKASINDO.

Dalam muhibah bisnis ke China ini, GAPKI diwakili oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dan Ketua Bidang Luar Negeri M. Fadhil Hasan



yang dipercaya menjadi salah satu pemateri dalam *The 15th China Int'l Cereals and Oils Conference*. Dalam forum ini, GAPKI menjelaskan posisi Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan produksi 45,5 juta ton pada 2022/2023.

China adalah negara importir utama minyak sawit Indonesia dengan permintaan sebesar 7,7 juta ton pada 2023 atau meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 6,2 juta ton. GAPKI berharap China dapat mempertahankan impor minyak sawit dari Indonesia di angka 7,7 juta ton. Bahkan, tidak menutup kemungkinan meningkat seperti tahun 2019 yang mencapai 8 juta ton. Kebutuhan pasar minyak sawit China lebih besar dibandingkan Uni Eropa yang hanya 3,7 juta ton pada 2023.

Minyak sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia

untuk pasar China di mana total perdagangan kedua negara tahun 2023 mencapai US\$ 127.819 miliar. Adapun importasi dari China sebesar US\$ 62.880 miliar yang berarti ada surplus perdagangan untuk Indonesia US\$ 2.057 miliar. Dengan potensi pasar yang besar ini, pengusaha China mengajak Indonesia lebih aktif menggarap pasar Tiongkok.

Kepada delegasi sawit Indonesia, Cao Derong mendorong supaya Indonesia lebih aktif dalam mempromosikan komoditas sawit di negerinya. Promosi yang efektif terbukti dapat menarik minat pasar lebih besar.

Cao Derong mencontohkan peningkatan ekspor minyak sawit dari Malaysia meningkat setelah membuka kantor di Shanghai dan aktif berpromosi. Indonesia diharapkan membuka kantor perwakilan di China untuk promosi komoditas sawit. ■

PEMERINTAHAN BARU DIYAKINI PERKUAT DAYA SAING SAWIT

Sawit itu luar biasa karena dapat dijadikan senjata bagi Indonesia untuk menyerang maupun bertahan.

Pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming diyakini akan memperkuat daya saing kelapa sawit sekaligus memberikan perlindungan maksimal. Pandangan ini terungkap dalam seminar *Menjaga Keberlanjutan Industri Sawit Dalam Pemerintahan Baru* yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) di Gedung Kementan, 4 Juli 2024. Dalam seminar ini GAPKI diwakili oleh Komp. Media Relations, Fenny Sofyan.

Sebagai perwakilan industri sawit, Fenny Sofyan menjelaskan peran minyak sawit Indonesia dalam konstelasi global. Komoditas sawit tidak hanya penting bagi Indonesia, namun juga dunia karena sawit Indonesia memasok 50% lebih kebutuhan minyak nabati dunia. Artinya ketergantungan dunia pada sawit sangat tinggi. Namun, yang perlu diwaspadai produktivitas sawit dalam beberapa tahun terakhir yang stagnan. Padahal permintaan terus meningkat.

Menurut Fenny Sofyan, untuk memenuhi target produksi sawit 92 juta ton pada 2045, saat Indonesia merayakan ulang tahun emas,

sektor hulu adalah kuncinya. Tanpa perbaikan di sektor hulu, dampaknya pasti berpengaruh ke sektor hilir yang sangat banyak. Mandatory program biodiesel dan ekspor bisa terganggu. Bahkan, sektor hilir yang sedang digencarkan sekarang juga akan terkena dampaknya.

Pemerintah baru diharapkan lebih gencar mengkampanyekan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) sebagai langkah penting merespon kampanye negatif dari dalam maupun luar negeri. Dengan menguatkan ISPO, dampaknya bagi industri sawit nasional sangat penting agar semakin independen. Pemerintah baru diharapkan menjadikan ISPO sebagai sertifikasi satu-satunya yang berlaku agar keberterimaan pasar terhadap sawit dapat terjadi.

Sementara itu, Guru Besar IPB University Rachmat Pambudy

menegaskan pemerintah dapat memilih kebijakan proteksi pada sawit, melindungi secara aktif dan pasif. Menurutnya, sawit sangat luar biasa karena dapat dijadikan senjata bagi Indonesia untuk menyerang maupun bertahan lantaran bisa dimanfaatkan sebagai produk makanan. Dalam konstelasi yang lebih luas, produk makanan sering dijadikan senjata untuk menghadapi lawan.

Sedangkan Ketua Umum APKASINDO Gulat Manurung mendorong pemerintah menguatkan program PSR karena sangat penting bagi industri sawit secara umum. Realisasi PSR yang masih belum sesuai harapan sebaiknya dijadikan fokus pemerintah baru. Caranya antara lain dengan sinkronisasi regulasi supaya tidak tumpang tindih yang justru bisa menghambat pencapaian target produksi. ■

um Gedung D Kementan
Juli 2024



PERCEPAT HGU, KEMENTERIAN ATR/BPN SIAPKAN TEROBOSAN

Terdapat 537 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum memiliki HGU.

Pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan izin HGU dan implementasi kebijakan FPKM masih menjadi isu penting industri kelapa sawit. Karena itu, Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara (Satgas Sawit) melakukan *Sosialisasi Regulasi dan Coaching Clinic Pemenuhan HGU dan FPKM* pada 18 Juli 2024. Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni hadir memberikan arahan terkait HGU dan FPKM dalam sosialisasi yang diadakan di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta ini.

Dalam sosialisasi ini beberapa

pengurus GAPKI yang hadir antara lain Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, Sekjen M. Hadi Sugeng, Wakil Ketua Umum II Susanto, Wakil Ketua Umum III Satrija B. Wibawa, Direktur Eksekutif Mukti Sardjono, Kabid Perkebunan R. Aziz Hidayat, dan beberapa pengurus GAPKI lainnya. Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Hasan Basri serta Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Herjon C.M. Panggabean.

Dalam pengarahannya Menteri Raja Juli Antoni menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama yang baik diharapkan bisa memberikan kepastian yang menjamin keberadaan perusahaan dan meningkatkan produktivitas. Dengan bekal kondisi dunia usaha yang baik, pada akhirnya pemerintah juga mendapatkan manfaat.

Persoalan terkait dengan produktivitas yang dihadapi oleh kelapa sawit sebenarnya sedang dihadapi juga berbagai sektor. Namun,

pemerintah optimistis dengan komitmen bersama pemerintah dan pelaku usaha dapat mencari solusi bersama. Masalah yang terjadi harus diuraikan satu persatu agar solusi yang ditawarkan adalah solusi yang tepat.

Kementerian ATR/BPN berkomitmen membenahi administrasi pertanahan dan tata ruang yang lebih baik dan lebih transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki orientasi melayani publik. Hal ini dilakukan secara bertahap dengan terus menyerap aspirasi maupun masukan dari masyarakat luas, termasuk dari dunia usaha.

Berdasarkan data Satgas Sawit hingga 19 April 2024, terdapat 537 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum memiliki HGU. Dari 537 perusahaan tersebut, 118 sedang dalam proses pengajuan HGU. Sedangkan 313 lainnya masih belum memenuhi HGU.

Menteri Raja Juli Antoni akan mengupayakan penyelesaian terbaik untuk perkebunan sawit yang belum memiliki data HGU. Pihaknya akan mencari terobosan karena penyelesaian HGU reguler membutuhkan waktu banyak. Salah satu yang paling mungkin dilakukan ada proses pengukuran yang lebih cepat. ■

PERKEBUNAN



BIMBINGAN TEKNIS PENGURUSAN IUP, HGU, DAN IMPLEMENTASI FPKMS

Realisasi FPKMS di Riau mencapai 23,73% yang terhitung paling tinggi di Indonesia.

Tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan dan bertanggung jawab merupakan komitmen GAPKI yang dijalankan secara konsisten. Praktik terbaik dalam tata kelola kelapa sawit harus dimulai dari kepatuhan terhadap regulasi. Untuk itu, GAPKI Cabang Riau menyelenggarakan *Bimbingan Teknis Memahami Perizinan dan Legalitas Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Kewajibannya* di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, 11 Juli 2024 yang diikuti anggota GAPKI Riau.

Salah satu tema utamanya yang dibahas dalam bimtek ini antara lain implementasi FPKMS (Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar) sebesar minimal 20% dari lahan yang diusahakan untuk mendapatkan IUP dan proses HGU. Topik ini penting mengingat lahan sawit di Riau mencapai 3,38 juta hektar. Menurut Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Syahril Abdi, dampak FPKMS sangat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.



Setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit diwajibkan memenuhi ketentuan FPKMS dalam waktu paling lama tiga tahun sesuai Permentan No. 98 Tahun 2013. Syahril Abdi bersyukur karena realisasi FPKMS di Riau mencapai 23,73% yang terhitung paling tinggi di Indonesia.

Ketua GAPKI Riau Lichwan Hartono mendorong perkebunan sawit yang belum memenuhi ketentuan ini agar segera mengurusnya. Pemenuhan regulasi bukan sekadar mendapatkan izin, namun juga berperan mengawal praktik tata kelola perkebunan yang berkelanjutan dan bertanggungjawab. GAPKI Riau mendukung penerapan peraturan ini karena salah satu yang dapat didapatkan perusahaan sawit adalah sertifikat pengakuan praktik sawit berkelanjutan.

Untuk mewujudkan komitmen ini, GAPKI Riau berkolaborasi dengan pemangku kepentingan sektor sawit seperti Dinas Perkebunan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Begitu juga kolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mendorong perusahaan sawit terutama anggota GAPKI Riau dalam memenuhi aturan dan regulasi dalam pengurusan IUP dan HGU.

Dalam bimtek ini, Ketua Bidang Perkebunan R. Aziz Hidayat menjelaskan saat ini sedang dilakukan penertiban pengisian FPKMS di Siperibun Kementan. Hal ini bertujuan agar data yang di-input

KEBUN SAWIT DI RIAU

- **LUAS LAHAN**
3,38 juta hektar
- **PENGELOLA**
 - Masyarakat 1,9 juta hektar
 - Perkebunan swasta 1,4 juta hektar
 - Perkebunan negara 76.000 hektar
- **PERKEBUNAN SAWIT**
257 perusahaan
- **PEMENUHAN FPKMS**
61 perusahaan
- **LUAS IUP**
1,73 juta hektar
- **Lahan FPKMS**
301.857,37 hektar

data IUP merupakan data lengkap yang mencakup IUP awal dan penyesuaian untuk menentukan kewajiban FPKMS-nya. Luasan FPKMS sebesar Rp 20% dihitung dari luas lahan yang diusahakan.

Menurut R. Aziz Hidayat, perusahaan yang belum meng-input data secara lengkap diberikan waktu hingga enam bulan ke depan untuk proses pengajuan HGU. Bimtek ini diharapkan dapat membantu mempermudah perusahaan, terutama anggota GAPKI yang masih dalam proses pemenuhan FPKMS maupun yang sedang memproses pengajuan HGU. ■

OMBUDSMAN DALAMI ATURAN LAHAN, PERIZINAN, DAN TATA NIAGA SAWIT

GAPKI diminta menyampaikan perusahaan yang akan dikunjungi sebagai sampel.

Lembaga negara yang berwenang mengawasi pelayanan publik di Indonesia, Ombudsman akan mendalami peraturan yang terkait status lahan, perizinan, dan tata niaga komoditas kelapa sawit. Rencana ini disampaikan Komisioner Ombudsman dalam pertemuan dengan GAPKI di Jakarta, 3 Juli 2024. Pertemuan ini dihadiri oleh Kabid Perkebunan R. Aziz Hidayat, Kabid Agraria & Tata Ruang Safwani, Kabid Hubungan Antar Lembaga Arief Susanto, serta Komp. Kemitraan dan Pembinaan Petani Budianto Tjuatja.

Pertemuan ini sebagai tindak lanjut dari *Focus Group Discussion* (FGD) tentang komoditas sawit di kantor Ombudsman pada Mei 2024. Status lahan, perizinan, dan tata niaga sawit menjadi menjadi *concern* bersama. Dalam pertemuan 3 Juli 2024, GAPKI menyampaikan bahwa posisi GAPKI tentang HGU dan HSM pada lahan sawit sudah final sehingga tidak masuk ranah Pasal 110A atau 110B tentang pengampunan kejahatan kehutanan.

Berdasarkan keadaan di lapangan, banyak kebun



sawit yang diidentifikasi masuk kawasan hutan justru setelah adanya perubahan tata ruang. Akibatnya lahan yang sudah memiliki HGU sekalipun bisa dikenakan ketentuan pasal 110B. Karena itu, GAPKI mendorong agar Ombudsman mendorong pemerintah mengkaji kembali PP Nomor 24 Tahun 2021.

Selain status lahan dan tata ruang, masalah lain yang didiskusikan adalah penunjukan dan penetapan kawasan hutan serta penetapan PNPB. Dunia usaha berharap supaya PNPB ini tidak sampai memberatkan pengusaha dan berdampak pada keberlanjutan industri sawit.

Terkait perizinan pendirian PKS tanda kebun dengan dasar PP Nomor 5

Tahun 2021, GAPKI menilai ketentuan ini perlu ditinjau kembali. Sebab, dalam satu PP memuat persyaratan perizinan yang berbeda. GAPKI mengusulkan pendirian PKS tanpa kebun merujuk pada UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Permentan No. 89 Tahun 2014.

Sedangkan masalah tata niaga sawit, GAPKI mengusulkan agar penetapan harga TBS yang berlaku bagi pekebun sawit yang bermitra dengan perusahaan. Adapun pekebun swadaya, penetapan harga TBS melalui mekanisme pasar.

Ombudsman telah menampung aspirasi GAPKI dan akan mengadakan kunjungan lapangan ke Kalimantan Tengah dan Sulawesi Barat. GAPKI diminta menyampaikan perusahaan yang akan dikunjungi sebagai sampel untuk pendalaman masalah status lahan, perizinan dan tata niaga sawit. ■



KONTRIBUSI GAPKI DALAM PENANGANAN GANODERMA



Konsorsium Ganoderma bagian dari program GAPKI dan mengikuti struktur kepengurusan GAPKI.

Dalam beberapa tahun ini, Ganoderma menjadi masalah serius bagi pelaku industri sawit karena sifatnya yang mematikan dan menular. GAPKI melakukan upaya pencegahan, salah satunya dengan membentuk Konsorsium Ganoderma. Konsorsium ini diinisiasi oleh Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Dwi Asmoro pada 24 Maret 2024 dan telah menyusun program pada rapat penyusunan rencana kerja di Kantor GAPKI pada 8-9 Juli 2024.

Rapat penyusunan rencana kerja yang berlangsung secara hybrid ini diikuti oleh perwakilan anggota GAPKI yang anggota konsorsium yang dipimpin oleh Indra Syahputra dari Komp. Best Management Practice GAPKI. Dalam rapat ini Kabid Riset dan Pengembangan Dwi Asmoro menyampaikan terima kasih kepada perwakilan anggota GAPKI yang bersedia menghidupkan kembali dan menjaga eksistensi Konsorsium Ganoderma.

Dwi Asmoro menegaskan bahwa kegiatan Konsorsium Ganoderma

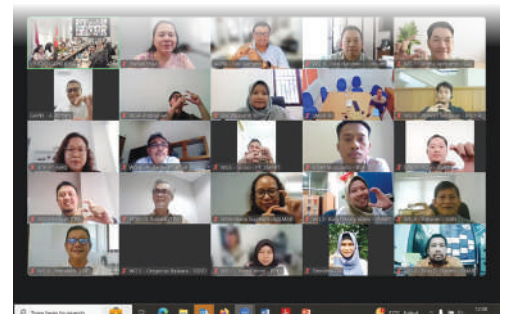
merupakan bagian dari program GAPKI dan mengikuti struktur kepengurusan GAPKI. Karena itu, konsorsium ini berada dalam naungan Bidang Riset & Pengembangan. Meski demikian, konsorsium ini terbuka dan dapat merangkul *stakeholders* skala nasional seperti institusi pemerintah, asosiasi profesi atau petani, perguruan tinggi, dan lain-lain.

Dalam rapat penyusunan rencana kerja, Konsorsium Ganoderma menetapkan delapan program utama yang akan dijalankan. Setiap program kerja punya kelompok kerja yang terdiri dari para ahli dan praktisi dari perusahaan anggota GAPKI. Setiap kelompok sudah menyusun rencana kerjanya dalam rapat 8-9 Juli 2024 dan akan disinkronisasi menjadi proposal riset yang relevan dengan program Ditjen Perkebunan Kementerian maupun BPDPKS.

Program kerja konsorsium ini diharapkan memberikan dampak signifikan dalam penanganan dan pencegahan penyakit busuk batang yang disebabkan oleh Ganoderma. ■

PROGRAM KERJA KONSORSIUM GANODERMA

- **PLANTING MATERIAL**
Eksplorasi material tanam yang tahan Ganoderma.
- **GANODERMA DATABASE**
Pembentukan database Ganoderma berbasis platform digital yang dapat diakses publik.
- **TECHNICAL CULTURE**
Best management practice terkait teknik penanganan dan pencegahan Ganoderma di lapangan.
- **INNOVATIVE GENETIC METHODS**
Marker assisted selection pada bahan tanam, Ganoderma dan agensia biologi antagonis Ganoderma.
- **DETECTION SYSTEM**
Kajian Sistem deteksi dini Ganoderma di lapangan.
- **BIOLOGICAL CONTROL**
Screening agensia biologi antagonis Ganoderma dan implementasinya di lapangan.
- **SMALLHOLDERS AWARENESS**
Sosialisasi terkait Penyakit serta cara penanganan Ganoderma di kalangan petani sawit.
- **POLICY DRAFT/PAPER**
Kajian dan usulan kebijakan penanganan dan pengendalian Ganoderma dari hasil program 1 – 7.





PETA JALAN MEMBEBAHKAN INDONESIA DARI PEKERJA ANAK

GAPKI tergabung dalam PAACLA, platform kemitraan menentang pekerja anak di sektor pertanian.

Sebagai organisasi para pengusaha kelapa sawit, GAPKI mencanangkan komitmen besar untuk mencegah dan menghapus pekerja anak dari industri sawit. Untuk memperkuat strategi penghapusan pekerja anak, GAPKI menghadiri peresmian *Roadmap Indonesia Bebas Pekerja Anak* yang diadakan oleh Kemnaker.

Dalam acara yang berlangsung di Hotel Pullman Central Park, Jakarta pada 22 Juli 2024 ini, GAPKI diwakili oleh Ketua Umum Eddy Martono, Ketua Dewan Pembina Joe fly Bahroeny, dan Kabid Pengembangan SDM Sumarjono Saragih. Dalam sambutan kegiatan ini, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menegaskan pemerintah tidak akan pernah berhenti melakukan penanggulangan pekerja anak demi terwujudnya Indonesia Emas Tahun 2045.

Selama 2008 hingga 2020, Kemnaker telah membebaskan 143.456 anak dari tempat kerja. Langkah ini hanya satu dari beberapa program yang dijalankan, di antaranya meningkatkan pemahaman lewat sosialisasi kepada dunia usaha dan masyarakat tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA). Karena itu, pelaku usaha selalu dilibatkan dalam percepatan penghapusan pekerja anak, termasuk dalam menyusun peta jalan ini.

Menaker Ida Fauziyah menegaskan upaya penghapusan pekerja anak di seluruh Indonesia harus disusun secara komprehensif yang memadukan peran pemerintah, sektor swasta, serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya. Karena itu, peta jalan ini diharapkan menurunkan angka pekerja anak secara bertahap dengan target

akhir Indonesia terbebas dari pekerja anak, khususnya BPTA.

Dalam pelaksanaan pencegahan dan penghapusan pekerja anak, GAPKI telah memberikan dukungan penuh melalui beberapa program. Salah satunya GAPKI tergabung dalam PAACLA, platform kemitraan menentang pekerja anak di sektor pertanian.

GAPKI juga bekerjasama dengan JARAK, PAACLA Indonesia, dan PKPA yang menyusun panduan praktis dan praktik baik perlindungan anak di perkebunan sawit.

Inisiatif ini bertujuan mempromosikan dan mendorong anggota GAPKI serta pelaku industri sawit yang lebih luas melaksanakan tata kelola industri sawit yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Salah satu strategi yang harus dilakukan adalah dengan merespon agenda dan standar global terkait dunia usaha yang melindungi, menghormati dan mendukung pemenuhan hak-hak anak. ■



DPR DIMINTA LOBI PARLEMEN UNI EROPA TUNDA EUDR

Dukungan parlemen negara lain diharapkan memperkuat bobot usulan penundaan EUDR.

GAPKI mengusulkan kepada Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk melobi parlemen Uni Eropa agar implementasi EUDR ditunda. Usulan ini disampaikan GAPKI dalam audiensi dengan BKSAP di Gedung DPR pada 1 Agustus 2024.

GAPKI diwakili oleh Wakil Ketua Umum III Satrija Budi Wibawa, Kepala Bidang Luar Negeri M. Fadhil Hasan, dan Ketua Hubungan Antar Lembaga Arief Susanto. Mereka diterima oleh Ketua BKSAP DPR Fadli Zon.

EUDR yang diterbitkan pada 29 Juni 2023 mulai berlaku pada awal 2025. Perusahaan memiliki waktu hingga 29 Desember 2024 untuk menyesuaikan operasi mereka sesuai dengan aturan baru ini. Implementasi EUDR akan berdampak serius terhadap komoditas sawit yang selama ini menjadi andalan komoditas ekspor Indonesia. Sekitar 2 juta petani sawit menjadi kelompok yang paling terdampak kebijakan EUDR sehingga menjadi juga menjadi perhatian BKSAP.

Dalam pandangan GAPKI, implementasi EUDR pada awal 2025 sangat merugikan kepentingan



Indonesia sehingga usulan penundaan dilakukan oleh berbagai pihak. Indonesia telah mengajak 19 negara penghasil komoditas perkebunan melakukan protes. GAPKI mengusulkan BKSAP juga mengajak parlemen negara lain seperti Amerika Serikat dan Brasil melakukan pendekatan ke parlemen Eropa terkait penundaan EUDR.

Ketua BKDSAP Fadli Zon menegaskan pihaknya menyambut positif usulan GAPKI dan menindak lanjuti usulan tersebut melalui saluran resmi.

Mengingat hubungan yang baik antara BKSAP dan parlemen Uni Eropa, Fadli Zon mengatakan surat usulan penundaan EUDR dari DPR melalui BKSAP akan memberikan bobot dan pengaruh bagi parlemen Uni Eropa. Harapannya parlemen

Uni Eropa dapat mempertimbangkan rencana implementasi EUDR awal tahun depan.

Menurut Fadli Zon, BKSAP akan berkomunikasi dengan parlemen negara lain yang terdampak kebijakan Regulasi Anti-Deforestasi Uni Eropa ini. Dukungan parlemen negara lain diharapkan memperkuat bobot usulan penundaan EUDR.

Dalam konteks perdagangan dengan Uni Eropa, Fadli Zon menyarankan supaya perundingan IEU-CEPA (*Indonesia- European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement*) segera dirampungkan agar tidak ada hambatan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Sampai saat ini, perundingan IEU-CEPA sudah memasuki putaran ke-17 dan diharapkan rampung pada tahun 2024 ini. ■



HINDARI MULTITAFSIR, GAPKI DAN PWI SOSIALISASIKAN FPKM

Materi ini diharapkan menjadi bekal bagi media dalam memberitakan kebijakan FPKM secara akurat dan tidak bias.

Kebijakan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) memiliki tujuan mulia supaya kehidupan masyarakat di sekitar perkebunan sawit semakin baik. Namun, pemahaman yang tidak utuh dan multitafsir terhadap kebijakan ini justru mengakibatkan munculnya masalah bagi perusahaan. Karena itu, sosialisasi kebijakan FPKM melalui media merupakan langkah strategis untuk menghindari potensi multitafsir dan kesalahpahaman.

Untuk sosialisasi kebijakan ini, PWI dan GAPKI mengadakan *workshop* di Hotel Gran Senyur, Balikpapan dan dilanjutkan kunjungan media pada 24-27 Juli 2024. Pelatihan dengan tema *Tinjauan Tantangan Implementasi Kebijakan FPKM di Kalimantan Timur Terhadap Potensi Pengembangan Ekonomi Daerah* ini diikuti oleh para jurnalis dari Kalimantan Timur. Topik ini dibahas secara detail, termasuk

dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan.

Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono menjelaskan kontribusi industri sawit bagi ekonomi daerah dan negara serta komitmen pengusaha untuk sawit berkelanjutan. Kebijakan FPKM dijelaskan secara detail, termasuk tahapan implementasi, hubungan perusahaan dengan masyarakat dalam kaitan dengan FPKM, dan lain-lain. Materi ini diharapkan menjadi bekal bagi media dalam memberitakan kebijakan FPKM secara akurat dan tidak bias.

Selain pemateri dari GAPKI, *workshop* ini juga menghadirkan pemateri lain seperti Kabid Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Laseman, Pejabat Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur Kompol Marhadi, Direktur Kaltim Post, Pemimpin Redaksi Antara Kaltim dan Ketua PWI Kalimantan Timur.

Pelatihan wartawan ini dilanjutkan dengan kunjungan media oleh GAPKI yang diwakili oleh Direktur Eksekutif Mukto Sardjono, Wakil Ketua Umum III Satrija B. Wibawa, Komp. Media Relations Fenny Sofyan dan Vazzareyno Galih Pramatha. Kunjungan media ini dilakukan ke kantor *Kaltim Post Group*, salah satu media ternama di Kalimantan Timur yang sudah hadir di Balikpapan sejak 1988.

Dalam diskusi bersama manajemen dan redaksi Kaltim Post ini, banyak hal yang dipaparkan terkait industri kelapa sawit di Kalimantan Timur. GAPKI mendapatkan masukan positif dari kalangan media sebagai bagian dari pengembangan komunikasi organisasi. Adapun Kaltim Post juga mendapatkan update tentang industri sawit sehingga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang komoditas ekspor andalan Indonesia ini. ■



GAPKI DAN ASOSIASI PRODUSEN CPO NIGERIA JALIN KERJASAMA

Kemudahan yang ditawarkan antara lain pengurangan pajak, pembebasan PPN, bebas bea impor, dan jaminan keamanan.

GAPKI terus memperluas pangsa pasar ekspor minyak sawit Indonesia ke berbagai negara, termasuk ke benua Afrika. Perluasan pasar dan peningkatan kerjasama dagang ini dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara GAPKI dan NPPAN *National Palm Produce Association of Nigeria* (NPPAN). Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dan President of NPPAN Alphonsus Inyang dalam rangkaian Festival Indonesia Expo di Affluent Event Center, Kano, Nigeria pada 23 Agustus 2024.

Festival Indonesia Expo diinisiasi oleh KBRI Nigeria yang dibuka oleh Duta Besar RI untuk Nigeria, Usra Hendra Harahap. Salah satu kegiatan dalam festival ini adalah studi banding delegasi Indonesia ke pabrik pengisian dan pengemasan minyak goreng di Kano Free Trade Zone (KTFZ) yang dipimpin oleh Kepala Kanselerasi KBRI Fahmi Aris Innayah dan Ketua Asosiasi Pedagang Kano Kascote Exco, Hassan Tahir Yaro.

Direktur KTFZ Muazu Musa Sahabi menyambut positif MoU antara GAPKI dan NPPAN untuk mengembangkan industri sawit di Nigeria. Pihaknya menegaskan komitmen untuk memfasilitasi investasi yang masuk



dengan menawarkan timbal balik yang dilengkapi berbagai macam kemudahan. Beberapa kemudahan yang ditawarkan oleh KTFZ antara lain pengurangan pajak, pembebasan PPN, bebas bea impor, serta jaminan keamanan tambahan bagi investor yang berinvestasi di Free Trade Zone di Kano.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini adalah tonggak penting hubungan perdagangan kedua negara. GAPKI berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan industri kelapa sawit di Nigeria dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan.

Indonesia dan Nigeria memiliki hubungan dagang yang cukup lama, termasuk perdagangan minyak sawit. Sampai saat ini, total ekspor produk sawit Indonesia ke Afrika mencapai 4,2 juta ton pada 2023. Sebanyak 94 ribu ton di antaranya dikirim ke Nigeria. Jumlah ekspor ini menunjukkan

potensi besar pasar sawit Nigeria untuk dikembangkan.

Wakil Sekjen GAPKI Lolita Bangun mengatakan pada pameran sehari sebelumnya pengusaha Nigeria menyatakan berminta membangun pabrik penyulingan minyak sawit sendiri. Untuk mendukung hal ini, pengusaha Nigeria diundang menghadiri *Indonesian Palm Oil Conference* (IPOC) 2024 di Bali pada 6-8 November 2024 nanti untuk bertemu para pemasok yang dapat memenuhi kebutuhan produksi dan investasi di industri sawit.

Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Lagos, Immanuel Lingga, mengatakan keterlibatan Indonesia dalam industri sawit di Nigeria akan meningkatkan kesejahteraan petani lokal sekaligus memperkuat citra positif sawit di pasar global. Penguatan citra positif di banyak negara, semakin memperkuat proses kampanye positif sawit secara global. ■

GAPKI MINTA PEMERINTAH TEGAS SOAL POME DAN PAO

Potensi kerugian Indonesia sejak September 2022 hingga Maret 2024 sekitar US\$ 391 juta.

Untuk menjelaskan kondisi terkini industri sawit kepada Kementerian Perdagangan sebagai salah satu pemangku kepentingan, GAPKI bertemu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kantor Kemendag pada 17 Juli 2024. Dalam kunjungan ini GAPKI diwakili oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, Waketum II Susanto, Kabid Luar Negeri M. Fadhil Hasan, Kabid Hub. Antar Lembaga Arief Susanto, Direktur



Eksekutif Mukti Sardjono, anggota Dewan Pembina Joko Supriyono.

Dalam pertemuan ini, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono memaparkan kondisi mutakhir komoditas sawit di mana terjadi penurunan ekspor. Sepanjang April 2024, ekspor sawit turun 14,94% yaitu dari 2.560 ribu ton pada Maret menjadi 2.178 ribu ton pada April 2024. Penurunan volume ekspor terbesar terjadi untuk tujuan China, dari 447 ribu ton menjadi 315 ribu ton, diikuti oleh India dari 456 ribu ton menjadi 332 ribu ton. Begitu juga ekspor ke Bangladesh dan Pakistan yang mengalami penurunan.

Penurunan ekspor minyak sawit ini justru berkebalikan dengan ekspor limbah sawit cair atau POME (*palm oil mill effluent*) dan *Palm Acid Oil* (PAO), minyak kotor hasil sampingan proses penyulingan minyak kelapa sawit. Permintaan ekspor

dari dua produk ini meningkat dalam beberapa tahun ini. Namun, negara justru dirugikan. Dalam catatan GAPKI, potensi kerugian Indonesia sejak September 2022 hingga Maret 2024 sekitar US\$ 391 juta. Apabila pemerintah tidak mengambil tindakan tegas, potensi kerugian bisa semakin besar.

Karena itu, pemerintah sudah saatnya bersikap tegas menerapkan aturan yang lebih adil agar industri sawit berkembang dengan baik. Perlakuan terhadap POME setidaknya harus sama dengan CPO dalam konteks ekspor. POME harus diperlakukan seperti CPO dengan wajib memenuhi *domestic market obligation* (DMO).

Jika dibiarkan dikhawatirkan mengganggu industri kelapa sawit secara keseluruhan.

Mendag Zulkifli Hasan memahami masalah yang dihadapi industri sawit, termasuk tentang kampanye negatif dan hambatan dagang dari luar negeri. Pemerintah akan memberikan perhatian lebih, terutama yang berkaitan dengan urusan luar negeri seperti pasar eksor dan hambatan dagang dari luar negeri. ■





PEMERINTAH DORONG PERUSAHAAN SAWIT GABUNG GAPKI

Dinas Perkebunan Provinsi Lampung berharap GAPKI hadir untuk menjadi mitranya.

Pemerintah terus mendorong perusahaan kelapa sawit untuk bergabung dengan GAPKI guna mempermudah komunikasi dan koordinasi kepentingan yang berhubungan dengan komoditas sawit. Apalagi pemerintah berkepentingan supaya perusahaan kelapa sawit memiliki sertifikat ISPO sebagai bagian penting dari sawit berkelanjutan. Berangkat dari kepentingan ini, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung mengadakan *Pembinaan Usaha Perkebunan dan Sosialisasi GAPKI*.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Emersia, Bandung Lampung pada 31 Juli 2024 ini Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dan GAPKI bertindak sebagai pemberi materi kepada puluhan perusahaan perkebunan kelapa sawit. GAPKI diwakili oleh Kompartemen Pelayanan Anggota, Hari Hartanto Kawitomo. Sedangkan Disbun Provinsi Lampung diwakili oleh Kepala Bagian Kelembagaan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. Materi yang diberikan adalah PP No. 26 Tahun

2021 tentang pertanian dan rencana aksi daerah Provinsi Lampung 2024.

Dengan memahami peraturan ini perusahaan perkebunan sawit diharapkan menyesuaikan diri dengan memenuhi persyaratan yang terkait perizinan, operasional perkebunan hingga tata kelola lingkungan. Pemerintah Provinsi Lampung berharap industri sawit di daerahnya berkembang sebagaimana di daerah lain. Sektor perkebunan, terutama sawit, diproyeksikan menjadi salah satu sektor andalan provinsi ini di masa depan.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Yuliasuti mengatakan pentingnya perusahaan kelapa sawit bergabung dengan GAPKI. Sebab, GAPKI merupakan mitra pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam urusan perkelapasawitan. Karena itu, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha akan lebih mudah melalui satu organisasi yakni GAPKI. Selain itu, perusahaan kelapa sawit lebih cepat mendapatkan informasi serta pembinaan dengan menjadi anggota



organisasi.

Dalam kesempatan ini, Komp. Pelayanan Anggota Hari Hartanto Kawitomo menjelaskan tentang peran dan kiprah GAPKI selama 43 tahun berdiri. Begitu juga dengan program kerja untuk kepentingan anggota dan kepentingan industri sawit secara umum. Sebagai organisasi yang matang, GAPKI merupakan mitra pemerintah dalam pengembangan industri sawit dan dilibatkan dalam banyak kegiatan pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri.

Dinas Perkebunan Lampung berharap GAPKI Cabang Lampung bisa hadir di Lampung untuk menjadi mitra pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit. ■

GAPKI PAPARKAN KUNCI SUKSES HILIRISASI PRODUK SAWIT



Selain GAPKI dan BDPKS, Kadin juga menghadirkan pembicara di forum ini.

Hilirisasi produk kelapa sawit menjadi salah satu program unggulan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus menjadikan Indonesia sebagai price center bagi CPO global. Program ini akan berjalan sukses apabila lima pelaku di industri sawit bersinergi secara intensif. Lima pelaku itu adalah perkebunan sawit rakyat sebagai penyedia bahan baku, industri hilir, pemerintah, pasar dalam dan luar negeri serta lembaga keuangan.

Pentingnya sinergi lima pelaku di industri sawit ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono dalam Katadata Sustainability Action for Future Economy (Katadata SAFE) 2024 bertajuk *Strengthening Sustainability*



to Accelerate Indonesia's Palm Oil Downstreaming yang diadakan oleh Katadata di Jakarta, 7 Agustus 2024. Materi serupa juga dipaparkan oleh Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BDPKS Kabul Wijayanto.

Dalam catatan GAPKI, luas area sawit nasional saat ini mencapai 16,38 juta hektar, sebesar 40 persennya di antaranya adalah perkebunan rakyat. Sayangnya, produksi sawit dalam negeri, terutama dari perkebunan rakyat mengalami stagnansi selama lima tahun terakhir.

Padahal, konsumsi produk sawit meningkat karena sawit komoditas yang terpakai habis. Selain produk yang utama, produk sampingan sawit seperti cangkang juga cukup beragam.

Dalam lima tahun ini, volume ekspor turun dari tahun ke tahun. Pada 2022 angka ekspor CPO nilainya mencapai US\$37 miliar. Sementara pada 2023 turun menjadi US\$29 miliar.

Secara kuantitatif, pada 2019 ekspor CPO mencapai 7,4 juta ton, kemudian menurun pada 2022

menjadi 3,4 juta ton atau tersisa 10 persen dalam bentuk bahan baku selebihnya dalam bentuk hasil *refinery*. Pada 2023, ekspor CPO hanya 2,6 juta ton.

Kondisi ini tidak lepas dari regulasi yang dinilai terlalu banyak. Dalam catatan GAPKI, saat ini ada 37 instansi yang terlibat dalam bisnis kelapa sawit yang menyebabkan peraturan menjadi tumpang tindih. Bahkan, Kementerian Agama pun ikut terlibat dalam sertifikasi halal produk CPO. Dunia usaha berharap pemerintah baru dapat lebih memberikan solusi konkret terhadap kendala-kendala di industri sawit.

Katadata SAFE 2024 ini menampilkan 50 pembicara untuk beragam topik. Selain GAPKI dan BDPKS, Kadin juga menghadirkan pembicara di forum ini. Selain seminar, Katadata SAFE 2024 juga menyajikan pameran ekonomi sirkular, pameran pekerjaan hijau, promosi perusahaan rintisan hijau, dan pameran kendaraan listrik. ■

MEMPERCEPAT REALISASI SERTIFIKASI ISPO DI KALIMANTAN TENGAH

Dari 118 anggota GAPKI Kalteng, 57 perusahaan sudah memiliki sertifikat ISPO.

Untuk mempercepat pencapaian penerapan sertifikat ISPO sebagai platform perkebunan sawit berkelanjutan di Indonesia, GAPKI Cabang Kalimantan tengah menyelenggarakan Sosialisasi dan Klinik ISPO di Swiss-Belhotel Danum, Palangkaraya pada 15-16 Agustus 2024.

Kegiatan ini diikuti oleh 63 perwakilan anggota GAPKI Kalteng. Dari total 118 anggota GAPKI Kalteng, sebanyak 57 perusahaan sudah memiliki sertifikat ISPO.

Materi Sosialisasi dan Klinik ISPO ini disampaikan oleh Indah Pasimura dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan Heri Moerdiono dari Lembaga Pelatihan Sumberdaya Indonesia Berjaya (LP-SIB).

Sosialisasi ini juga dihadiri oleh Kepala Bidang Perkebunan R. Aziz Hidayat, Komp. Kehutanan I Nyoman Suyasa, dan Tim Pokja ISPO Ahmad Wahyudi. Materi sosialisasi mencakup perkembangan terkini ISPO, dukungan pemerintah dalam penerapan ISPO, serta prinsip dan kriteria ISPO dengan Permentan No. 38 Tahun 2020.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Nuryakin yang mewakili Gubernur Kalteng menyampaikan terima kasih kepada GAPKI Kalteng yang membantu pemerintah dalam mewujudkan sawit berkelanjutan. Sebab, komoditas sawit merupakan tulang punggung perekonomian



Kalimantan Tengah sehingga keberlanjutan sektor ini harus dikawal bersama.

Ketua GAPKI Kalteng Syaiful Panigoro mengatakan kegiatan diadakan oleh Bidang Sustainability GAPKI Kalimantan Tengah. Karena itu, peserta yang mewakili perusahaan anggota GAPKI dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan maksimal. Akselerasi sertifikasi ISPO dapat dijalankan oleh perusahaan perkebunan sawit di Kalteng dengan baik.

Dalam klinik ISPO ini, Ketua Bidang Perkebunan GAPKI R. Aziz Hidayat memberikan beberapa kiat dalam penerapan dan percepatan ISPO, pemenuhan FPKM, percepatan pengurusan HGU dan risiko bagi perkebunan yang tidak mengurus

HGU sampai batas waktu 3 Desember 2024. Materi lain yang disampaikan adalah *land application* yang akan mempersyaratkan baku mutu BOD kurang dari 100 ppm dan masalah terkait UU Cipta Kerja Pasal 110A dan 110B.

Menurut R. Aziz Hidayat, masalah yang menghambat ISPO antara lain kepatuhan Siperibun, penyelesaian sawit terindikasi masuk kawasan hutan. kebijakan limbah cair pabrik dan PKS tanpa kebun serta PKS brondolan. Dengan mengenali sumber masalah dan kiat menyelesaikan, diharapkan jumlah anggota GAPKI Kalteng yang meraih sertifikat ISPO semakin banyak. Target mewujudkan sawit berkelanjutan pun lebih cepat tercapai. ■



GAPKI MINTA CPO DIKECUALIKAN DALAM SERTIFIKASI HALAL

CPO adalah produk yang dihasilkan oleh kelapa sawit di mana dalam proses produksinya tidak bersinggungan produk nonhalal.

GAPKI mengusulkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar produk minyak sawit mentah (CPO) dikecualikan sertifikasi halal. Hal ini disampaikan oleh delegasi GAPKI dalam audiensi dengan BPJPH di Jakarta pada 9 Agustus 2024. Delegasi GAPKI terdiri dari Kabid Promosi dan Perdagangan Manumpak Manurung, Kompartemen Kemitraan dan Pembinaan Petani Budianto Tjuatja, Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono dan anggota GAPKI dari PT. Smart Tbk, Arief Wibisono.

Audiensi ini sekaligus tindak lanjut dari surat GAPKI No. 182 tanggal 24 Mei 2024 yang ditujukan kepada Menteri Agama terkait masukan pada pengaturan sertifikasi halal untuk CPO. Dalam surat ini, GAPKI meminta Menteri Agama meninjau kembali SK Kemenag No. 1360 Tahun 2021 yang memasukkan CPO dalam produk yang harus memiliki sertifikat halal.

Jaminan produk halal di Indonesia diatur oleh PP No. 39 Tahun 2021



sebagai tindak lanjut dari Pasal 48 dan 185 UU Cipta Kerja. Ketentuan ini mengatur semua produk makanan, minuman, dan lain-lain yang tidak dikecualikan harus memiliki sertifikat halal.

Sertifikat ini harus dipenuhi sebelum Oktober 2024. Dalam SK Kemenag No.1360 tahun 2021, CPO tidak termasuk produk yang dikecualikan sehingga wajib mendapatkan sertifikat halal.

Dalam pandangan GAPKI, semestinya CPO termasuk yang dikecualikan sehingga tidak perlu mendapatkan sertifikat halal. CPO adalah produk yang dihasilkan oleh kelapa sawit di mana dalam proses produksinya tidak bersinggungan atau tercampur produk nonhalal. Hal ini berbeda dengan produk hilir sawit

seperti mentega, minyak goreng, dan sejenisnya yang butuh pencampuran dengan bahan lainnya sehingga wajib mendapatkan sertifikat halal.

Setelah mendapat masukan dan penjelasan dari GAPKI, BPJPH menerima masukan atas SK Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021, terutama tentang tidak dimasukkannya CPO dalam produk yang dikecualikan sertifikat halal. Saat ini BPJPH sedang melakukan peninjauan atas keputusan Menteri Agama di atas untuk ditindak lanjuti.

Selain itu, BPJPH menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima masukan dari beberapa ahli supaya CPO dan VCO dimasukkan dalam produk yang dikecualikan sertifikasi halal. Dengan demikian, CPO dan VCO tidak harus memiliki sertifikat halal. ■





PEJABAT GUBERNUR SUMSEL RESPON POSITIF MASUKAN GAPKI

Beberapa masalah yang disampaikan GAPKI juga menjadi concern pemerintah seperti overlap status lahan.



Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah penghasil komoditas sawit di Indonesia dengan luas sekitar 1,2 juta hektar. Potensi daerah ini masih dapat dikembangkan melalui koordinasi yang solid semua pemangku kepentingan sawit. Karena itu, GAPKI melakukan audiensi dengan Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi di Griya Agung, Palembang pada 29 Juli 2024. Rombongan GAPKI terdiri dari pengurus GAPKI Pusat dan GAPKI Cabang Sumatera Selatan.

Dalam pertemuan ini, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono memaparkan perkembangan industri sawit terkini,

termasuk tantangannya. Salah satunya adalah banyaknya instansi yang terlibat di sektor sawit, setidaknya 37 instansi pemerintah, sehingga terjadi tumpang tindih peraturan. Dampak yang ditimbulkan antara lain indikasi kebun sawit yang dimasukkan ke kawasan hutan.

Kebun sawit yang diindikasikan masuk kawasan hutan ini menjadi kendala bagi petani di Sumsel menjalankan program PSR. Status lahan merupakan masalah paling banyak yang dihadapi oleh petani sawit. Dalam kesempatan ini GAPKI Sumsel juga menjelaskan belum

adanya pelabuhan samudera di provinsi ini sehingga mengakibatkan *double cost transport* bagi pengusaha kelapa sawit dan munculnya pencatatan ekspor yang bias dengan pencatatan ekspor provinsi lainnya.

GAPKI Sumsel juga menyoroti PKS tanpa kebun dan PKS brondolan yang meningkatkan potensi pencurian TBS dan persaingan yang tidak sehat. Selain itu, GAPKI Sumsel mencatat beberapa kasus konflik sosial berawal dari *illegal drilling* seperti yang marak di Kabupaten Musi Banyuasin. GAPKI berharap langkah pemerintah menjadi hal positif bagi perusahaan dan petani sawit.

Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi menegaskan beberapa masalah yang disampaikan GAPKI juga menjadi *concern* pemerintah seperti *overlap* status lahan.

Karena itu, ego sektoral lembaga dan kementerian perlu diselesaikan dengan baik sehingga birokrasi lebih sederhana. Masalah lahan pedoman utamanya adalah legalitas yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN.

Pemprov Sumsel akan meningkatkan layanan untuk semua lapisan masyarakat, terlebih para pemangku kepentingan sektor sawit. Beberapa masukan, termasuk persiapan menghadapi ancaman karhutla akan menjadi prioritas dalam waktu dekat. ■

GAPKI SUMSEL DORONG ANGGOTA RAIH PROPER HIJAU

Hingga saat ini, terdapat 263 perusahaan di Sumatera Selatan, 35% di antaranya merupakan perusahaan sawit.

Anugerah PROPER yang diinisiasi oleh Kementerian LHK merupakan apresiasi atas kinerja dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan, ekoinovasi, inovasi sosial, dan kepemimpinan lingkungan untuk mendorong ketaatan industri terhadap regulasi bidang lingkungan hidup. Penghargaan ini juga menjadi indikator bagi perusahaan kelapa sawit terkait tata kelola, kepatuhan dan kepedulian pada lingkungan hidup. Pencapaian ketaatan diwujudkan dalam dua jenis yakni PROPER Emas dan PROPER Hijau.

Untuk mendorong industri sawit meraih anugerah PROPER Hijau, GAPKI Cabang Sumsel mengadakan *Ngobrol Pintar Masalah Sawit* (Ngopi Masa) di Hotel Harper, Palembang pada 25 Juli 2024. Kegiatan ini mengusung tema *Menuju PROPER Hijau Industri Sawit - Regulasi, Evaluasi, Saran dan Tindak Lanjut* dengan narasumber Dinas LHP Provinsi Sumatera Selatan, akademisi Universitas IBA Palembang dan praktisi anggota GAPKI Sumatera Selatan.

Ketua GAPKI Sumatera Selatan Alex Sugiarto mengatakan Ngopi Masa adalah program kerja GAPKI Sumsel untuk mendorong semakin banyak perusahaan sawit yang meraih PROPER Hijau. Untuk mendapatkan apresiasi PROPER Hijau masih banyak kendala dan keterbatasan yang dialami perusahaan sawit. Diskusi ini diharapkan membantu perusahaan sawit mampu meningkatkan ketaatan pada regulasi sehingga meraih PROPER Hijau.

Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, Pengelolaan Sampah B3, dan Limbah B3 Dinas LH dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Idrus Salam mentatakan penilaian PROPER diatur dalam Permen LHK



Nomor 1/ 2021 tentang penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peringkat diberikan berdasarkan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.

Sepanjang 2022-2023 sebanyak 8 perusahaan di Sumatera Selatan meraih PROPER Emas, 14 perusahaan meraih PROPER Hijau, 121 perusahaan meraih PROPER Biru. Sosialisasi tentang anugerah PROPER ini terus dilakukan. Hingga saat ini, terdapat

263 perusahaan di Sumatera Selatan, 35% di antaranya merupakan perusahaan sawit.

Kepala Bidang Sustainability GAPKI Cabang Sumatera Selatan Yunita Widiastuti mentatakan PROPER Hijau menjadi cita cita besar dari perusahaan sawit. Setiap anggota GAPKI memiliki impian meraih PROPER Hijau. Pencapaian ini pernah dibuktikan oleh PT Hindoli yang mampu meraih PROPER Hijau pada tahun 2015. ■



GAPKI KALBAR FOKUS KEMBANGKAN KAPASITAS SDM SAWIT

GAPKI Kalbar mendapatkan kepercayaan sebagai penyelenggara agenda tahunan yakni Borneo Forum ke-8 tahun 2025.



GAPKI Cabang Kalimantan Barat akan berfokus pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang sawit pada sisa masa kepengurusan GAPKI Kalbar 2020-2025 yang akan berakhir delapan bulan mendatang. Rapat kerja di Hotel Mercure, Pontianak, 31 Juli 2024 dengan tema *Menuju Kelapa Sawit Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia* ini dihadiri oleh Kadis Perkebunan dan Peternakan Kalbar, Wakil Ketua Umum III GAPKI Satrija B Wibawa, Dewan Pembina GAPKI Kalbar, dan lain-lain.

Ketua GAPKI Kalbar Purwani Munawir mengatakan GAPKI Kalbar fokus pada pengembangan sumber daya manusia karena menjadi faktor kunci menghadapi tantangan ke depan. Selain itu, dinamika industri sawit membutuhkan sumber daya yang kompeten untuk menguasai teknologi budidaya dan teknologi pengolahan komoditas sawit yang lebih baik. Kemampuan SDM yang baik akan mendorong pertumbuhan industri sawit semakin baik.

GAPKI Kalbar menjelaskan bahwa selama 10 tahun terakhir perkembangan industri sawit cukup pesat karena membaiknya iklim investasi di Kalimantan Barat. GAPKI sebagai pelaku usaha perkebunan sawit merasakan ketenangan dan aman berinvestasi. Hal ini tidak lepas dari kebijakan taktis dan strategis pimpinan daerah berupa peraturan daerah,

peraturan gubernur dan peraturan bupati serta layanan yang diberikan.

Rapat kerja ini mengevaluasi beberapa program kerja yang sudah dijalankan untuk bahan perbaikan di sisa waktu pengurusan GAPKI Kalbar 2020-2025 yang berakhir 7 Maret 2025. Sesuai dengan AD/ART kepengurusan GAPKI Kalbar saat ini dapat diperpanjang selama 3 bulan untuk persiapan penyegaran pengurus melalui musyawarah cabang. Apalagi GAPKI Kalbar mendapatkan kepercayaan sebagai tuan rumah dan penyelenggara agenda tahunan yakni Borneo Forum ke-8 tahun 2025.

Dalam rapat kerja cabang ini, Wakil Ketua Umum III GAPKI Satrija B Wibawa menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia di industri sawit. Sebab, komoditas ini merupakan komoditas andalan tidak hanya bagi Kalimantan Barat, namun juga Indonesia. Sumbangsih yang diberikan industri sawit bagi daerah maupun negara sangat signifikan, baik dari aspek ekonomi, kesejahteraan masyarakat hingga pengentasan kemiskinan.

Di masa depan, sawit semakin diandalkan dalam program andalan pemerintah pusat yakni ketahanan pangan dan kemandirian energi. Karena itu, kapasitas sumber daya manusia di industri sawit harus selaras dengan kebutuhan zaman dan dinamika pasar yang menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia. ■



RAKERCAB GAPKI KALTENG TEKANKAN PROGRAM KEBERLANJUTAN

Program kerja GAPKI Kalteng akan terus diselaraskan dengan kebutuhan anggota, terutama kebutuhan yang mendesak.

GAPKI Cabang Kalimantan Tengah menekankan program keberlanjutan dalam Rapat Kerja Cabang (Rakercab) yang berlangsung di Aquarius Boutique Hotel, Sampit pada 2 Agustus 2024. Rapat kerja ini bertujuan menyusun dan menetapkan program-program kerja tahun 2024-2025 sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2024 sesuai dengan AD/RT GAPKI Kalteng. Dalam pembukaan rapat, Bupati Kotawaringin Timur, H Halikinnor menekankan pentingnya kebijakan dan strategi yang inovatif bagi industri kelapa sawit.

GAPKI didorong merumuskan strategi yang inovatif dan berkelanjutan untuk mengantisipasi perubahan kebijakan maupun dinamika pasar. Rakercab ini merupakan momentum yang tepat untuk merumuskan strategi sehingga kontribusi GAPKI Kalteng semakin signifikan bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah. Penciptaan lapangan kerja merupakan peluang yang paling besar disediakan industri sawit bagi masyarakat sekitar.

Bupati H. Halikinnor mengatakan 18 dari 54 perusahaan sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur sudah

bergabung dengan GAPKI Kalteng. Untuk tingkat provinsi, anggota GAPKI Kalteng mencapai 118 perusahaan. Bupati mendorong perusahaan sawit yang lain untuk bergabung dengan GAPKI Kalteng sehingga komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha berjalan semakin kondusif.

Sementara itu, Ketua GAPKI Kalteng Syaiful Panigoro mengatakan sebagai organisasi pelaku industri sawit, GAPKI Kalteng akan selalu memfasilitasi anggota untuk selalu taat terhadap aturan. Salah satu program yang diperkuat adalah sertifikasi ISPO anggota GAPKI Kalteng. Dari 118 anggota GAPKI Kalteng, 54 anggota sudah mengantongi sertifikat ISPO. Sedangkan 64 perusahaan belum bersertifikat ISPO.

Untuk mendorong sertifikasi ISPO, GAPKI Kalteng mengadakan sosialisasi kepada anggota yang belum memiliki ISPO pada 14-15 Agustus 2024. Program lainnya untuk anggota GAPKI adalah mendorong penyelesaian izin HGU dan implementasi kebijakan FPKM. Upaya GAPKI Kalteng cukup positif karena Kementerian ATR/BPN akan membantu mempercepat proses pengurusan HGU untuk 43



perusahaan sawit di Kalimantan Tengah

Syaiful Panigoro mengatakan program kerja GAPKI Kalteng akan terus diselaraskan dengan kebutuhan anggota, terutama kebutuhan yang mendesak yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha mereka. ■



GAPKI KALTIM PERKUAT SOLIDITAS DAN SINERGITAS

Program jangka pendek yang sudah disiapkan menyasar dunia pendidikan.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dan Sekjen GAPKI M. Hadi Sugeng melakukan pelantikan sekaligus pengukuhan pengurus GAPKI Cabang Kalimantan Timur 2024-2029 di Gran Senyur Hotel, Balikpapan pada 27 Agustus 2027. Pengukuhan pengurus ini dilanjutkan dengan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) pertama untuk menyusun program dan rencana kerja. GAPKI Kaltim 2024-2029 dipimpin oleh Rachmat Perdana Angga.

Raker yang diikuti seluruh anggota GAPKI Kaltim ini mengangkat tema Penguatan *Soliditas dan Sinergitas yang Mendorong Eksistensi dan Kolaborasi Keorganisasian dengan Seluruh Pemangku Kepentingan dalam Mewujudkan Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk Masa Depan yang Lebih Baik*. Pengukuhan pengurus GAPKI Kaltim 2024-2029 juga dihadiri oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dan Dewan Pembina GAPKI.

Akmal Malik meminta GAPKI Kaltim mengajak perusahaan sawit di

daerah ini bergabung dengan GAPKI karena anggota GAPKI Kaltim masih 30% dari total perusahaan sawit yang beroperasi di Kalimantan Timur. Dengan bergabung dalam satu wadah, komunikasi dan koordinasi antara dunia usaha dan pemerintah semakin baik. GAPKI Kaltim diharapkan bisa mengajak 50% dari perusahaan sawit di Kaltim menjadi anggota.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebutkan kebun sawit di Kaltim seluas 1,3 juta hektare, tetapi perusahaan sawit yang menjadi anggota baru sekitar 406.000 hektare. Pengurus GAPKI Kaltim yang baru diminta segera menjalankan program kerja dan kegiatan utama organisasi, seperti percepatan PSR dan ISPO, jalur kemitraan, fasilitasi pembangunan kebun rakyat 20% dan advokasi kebun sawit dalam kawasan hutan.

Ketua GAPKI Kaltim Rachmat Perdana Angga mengatakan kolaborasi yang kuat antara GAPKI Kaltim dan semua pihak terkait untuk mewujudkan industri sawit



yang berkelanjutan tentu sangat dibutuhkan. Karena itu, soliditas organisasi menjadi faktor penting yang ditekankan untuk menjalankan program kerja dan kegiatan organisasi dengan baik. Ia menegaskan jika industri sawit di Kaltim berkembang dengan cara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Program jangka pendek yang sudah disiapkan menyasar dunia pendidikan. GAPKI Kaltim akan melakukan edukasi ke sejumlah sekolah dan perguruan tinggi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya industri sawit yang berkelanjutan. ■

PAHAMI HAK-HAKNYA, LINDUNGI PEKERJANYA

Dengan memahami hak-hak pekerja perempuan, suasana kerja semakin kondusif.

Pekerja perempuan di industri kelapa sawit menjadi perhatian besar GAPKI yang diwujudkan dalam berbagai program untuk memberikan perlindungan maksimal. Perhatian ini tidak hanya diberikan oleh GAPKI Pusat, namun juga GAPKI Cabang seperti GAPKI Cabang Kalimantan Barat yang menggelar seminar dan workshop di Hotel Golden Tulip, Pontianak pada 28-29 Agustus 2024. Seminar ini diikuti oleh 110 peserta dari berbagai kalangan dan *workshop* diikuti oleh 50 orang perwakilan anggota GAPKI Kalbar.

Seminar dan *workshop* ini dihadiri oleh Pj Gubernur Kalbar Harisson, perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, perwakilan Kementerian Tenaga Kerja, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, perwakilan ILO, JAPBUSI, dan organisasi di bidang ketenagakerjaan. Dalam seminar ini, GAPKI diwakili oleh Kabid Pengembangan SMD Sumarjono Saragih dan Komp. Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak, Marja Yulianti.



Menurut Ketua GAPKI Cabang Kalbar Purwati Munawir, untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi pekerja perempuan di industri sawit, edukasi untuk penyamaan persepsi tentang regulasi yang terkait hak-hak dan perlindungan pekerja perempuan harus didahulukan. Karena itu, pemahaman terhadap hak pekerja perempuan menjadi faktor utama yang harus dipahami oleh pelaku industri kelapa sawit.

Komitmen GAPKI dalam perlindungan perempuan sudah diwujudkan sejak lama. Pada 2021 GAPKI bersama CNV International dan Federasi Serikat Pekerja Hukatan menyusun Panduan Praktis untuk membantu pengusaha sawit menyusun kebijakan di tingkat perusahaan. Panduan ini menjadi rujukan bagi semua pelaku industri

sawit untuk mewujudkan industri sawit yang ramah bagi pekerja perempuan. Sampai sekarang, panduan praktis ini terus disosialisasikan bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS).

Pj Gubernur Kalbar Harisson mengajak GAPKI untuk bersama-sama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Salah satu caranya memperhatikan kesejahteraan pekerja, khususnya perempuan. Dengan memahami hak-hak pekerja perempuan, suasana kerja semakin kondusif.

Selain itu, keterlibatan perempuan dalam industri perkebunan sawit merupakan bagian penting dalam proses di sektor hulu maupun hilir. Apalagi sekitar 85 persen pekerja wanita perkebunan sawit merupakan buruh dan sisanya pekerja administrasi atau perkantoran. ■



MENGENALKAN KEBAIKAN KELAPA SAWIT SEJAK DINI



Dinas Pendidikan Kota Balikpapan akan memasukan kelapa sawit dalam muatan lokal sekolah.

Mengenalkan kebaikan kelapa sawit kepada generasi muda merupakan salah satu faktor penting pengembangan industri sawit di masa depan. Dengan pemahaman yang positif, anak-anak muda tidak mudah terprovokasi oleh kampanye negatif tentang kelapa sawit. Langkah ini yang dilakukan oleh BDPKPS yang bekerjasama dengan PGRI Kota Balikpapan dalam *Palm Oil Edu Talk dan Sawit @School dengan Peran Kelapa Sawit Bagi Indonesia*.

Dalam kegiatan yang diikuti oleh 300 siswa dan guru dari 16 SMA/SMK di Kota Balikpapan ini, Wakil Ketua Umum III GAPKI Satrija B Wibawa menjelaskan bagaimana peranan kelapa sawit dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam 24 jam hidup manusia setiap hari, tidak akan lepas dari keterkaitan dengan produk dari sawit. Tidak hanya minyak goreng, namun juga produk kosmetik, perlengkapan mandi, dan lain-lain.

Ketua PGRI Kota Balikpapan Puguh Birowo, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan positif ini sehingga generasi muda dapat mengantisipasi isu negatif tentang kelapa sawit di daerah-daerah yang

memiliki perkebunan sawit, termasuk Balikpapan. Para siswa di Balikpapan diminta untuk memahami seluk beluk sawit agar tidak terjebak dengan kabar negatif yang mudah ditemukan di dunia maya.

Sedangkan Kepala Bidang PSD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Triyuni Astuti mengharapkan agar guru dapat berperan penting menyampaikan hal baik tentang sawit kepada para siswanya. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan akan memasukkan informasi kelapa sawit ini pada buku muatan lokal untuk siswa dalam mata pelajaran PKLH yang dapat direvisi dua tahun sekali.

Menurut Triyuni, dunia pendidikan berperan penting dalam menangkap informasi negatif tentang kelapa sawit. Selama ini, generasi muda kurang mendapatkan pemahaman yang lengkap sehingga mudah tersusupi oleh kampanye negatif. Langkah Dinas Pendidikan Kota Balikpapan memasukan kelapa sawit dalam muatan lokal diharapkan menjadi inspirasi

bagi daerah lain melakukan hal serupa.

Kegiatan *Palm Oil Edu Talk* di Balikpapan ini merupakan upaya menyampaikan fakta objektif tentang kelapa sawit dengan menghadirkan beberapa narasumber antara lain Kepala Divisi Perusahaan BDPKPS Achmad Maulizal Sutawijaya, Wakil Ketua Umum III GAPKI, Satrija Budi Wibawa dan Ketua Umum MAKSI Darmono Taniwiryo. ■





GAPKI BERSATU, SAWIT MAJU

GAPKI Sumut menaruh perhatian besar karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha perkebunan sawit.



GAPKI Cabang Sumatera Utara berfokus pada tema penguatan soliditas organisasi dalam Rapat Kerja Cabang (Rakercab) di Hotel Four Points by Sheraton, Medan pada 5 September 2024. Tema ini dinilai relevan dengan perkembangan terkini di mana dinamika organisasi membutuhkan penguatan aspek internal. Karena itu, GAPKI Sumut mengangkat tema *GAPKI Bersatu, Sawit Maju* sebagai topik utama rapat kerja cabang tahun ini.

Rakercab GAPKI Sumut ini dihadiri oleh pengurus GAPKI Sumut 2023-2028 dan pengurus GAPKI Pusat. Dalam sambutan rapat, Sekretaris Jenderal GAPKI M. Hadi Sugeng mengatakan GAPKI Sumut memiliki nilai sejarah penting bagi industri sawit di Indonesia maupun GAPKI. Karena itu, Sekjen GAPKI mengajak GAPKI Sumut berfokus pada program kerja yang dapat dirasakan manfaatnya oleh anggota.

Menurut Ketua GAPKI Sumut Timbas Prasad Ginting, penguatan

organisasi merupakan isu penting karena peran dan tanggung jawab GAPKI Sumut semakin besar. Karena itu, program kerja yang sudah dijalankan dalam satu tahun terakhir perlu dievaluasi. Hasil evaluasi sangat penting untuk perjalanan organisasi ke depan. Dari evaluasi ini GAPKI Sumut memiliki bekal yang cukup untuk merencanakan program kerja untuk satu tahun ke depan.

Salah satu tanggung jawab yang dipikul oleh GAPKI Sumut adalah kepercayaan menjadi tuan kadhi untuk mempertemukan pekebun dan perusahaan anggota GAPKI Sumut dalam rangka akselerasi program PSR.

Keberhasilan PSR sangat penting artinya bagi industri sawit secara keseluruhan karena petani merupakan bagian dari mata rantai penting. PSR diharapkan bisa meningkatkan produktivitas tanaman pekebun untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Timbas Prasad Ginting mengatakan untuk mendukung percepatan PSR salah satu masalah yang harus

diselesaikan adalah masalah kebun sawit yang terindikasi masuk kawasan hutan. Hal ini tidak hanya terjadi di Sumatera Utara, tapi juga di daerah lain. Meski demikian, GAPKI Sumut menaruh perhatian besar karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha perkebunan sawit.

Penyelesaian kebun sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan masih belum tuntas. GAPKI Sumut berharap usulan dan masukan yang disampaikan oleh GAPKI kepada pemerintah dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.

GAPKI Sumut berharap Rakercab ini menjadi momentum untuk meningkatkan semangat berkontribusi kepada organisasi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan industri sawit.

Hasil rapat kerja ini akan menjadi panduan bagi pengurus GAPKI Sumut menjalankan roda organisasi di masa mendatang. ■

PRODUKSI CPO TURUN, EKSPOR JUSTRU NAIK

Ekspor untuk tujuan Uni Eropa mengalami penurunan 41 ribu ton menjadi 275 ribu ton.

Kondisi komoditas sawit menjelang pertengahan 2024 dapat dilihat dari tingkat produksi minyak sawit mentah sepanjang bulan Juni 2024. Produksi CPO (*Crude Palm Oil*) periode Juni 2024 mencapai 3.691 ribu ton. Tingkat produksi ini menunjukkan penurunan sebesar 5% karena pada Mei 2024 jumlah produksi CPO mencapai 3.885 ribu ton. Hingga bulan Juni 2024, total produksi CPO tahun 2024 lebih rendah 4,07% dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono mengatakan penurunan juga terjadi pada konsumsi dalam negeri. Total konsumsi dalam negeri turun 3 ribu ton dari semula 1.943 ribu ton pada Mei 2024 menjadi 1.940 ribu ton pada Juni 2024. Konsumsi dalam negeri untuk kebutuhan pangan naik 1 ribu ton. Sedangkan untuk kebutuhan oleokimia naik 5 ribu ton dibandingkan bulan 2024. Sedangkan untuk biodiesel turun dari 907 ribu ton menjadi 898 ribu ton.

Meskipun produksi CPO mengalami penurunan, ekspor justru mengalami kondisi sebaliknya. Total ekspor sepanjang Juni 2024 mengalami kenaikan yang sangat tinggi

menjadi 3.385 ribu ton dibandingkan total ekspor bulan Mei 2024 yang sebesar 1.964 ribu ton. Peningkatan terbesar terjadi pada produk olahan CPO yang naik 872 ribu ton dari 1.365 ribu ton pada Mei 2024 menjadi 2.237 ribu ton pada Juni

demikian, nilai ekspor naik menjadi \$2.798 juta pada bulan Juni 2024 dari bulan Mei 2024 sebesar \$1.728 juta.

Sedangkan berdasarkan negara tujuannya, kenaikan ekspor terbesar terjadi untuk tujuan India. Kenaikan



2024 diikuti CPO yang naik dengan 578 ribu ton menjadi 651 ribu ton.

Menurut Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono, kenaikan volume ekspor ini dibarengi dengan kenaikan harga dari \$981/ton pada bulan Mei 2024 menjadi \$1.011/ton pada bulan Juni 2024. Dengan

ekspor ke India mencapai 599 ribu ton menjadi 783 ribu ton. Tujuan ekspor berikutnya adalah China yang naik 322 ribu ton menjadi 712 ribu ton, Pakistan yang naik 156 ribu ton menjadi 286 ribu ton, Mesir yang naik 100 ribu ton menjadi 122 ribu ton.

Adapun ekspor untuk tujuan Uni Eropa mengalami penurunan 41 ribu ton menjadi 275 ribu ton.

Penurunan ekspor juga terjadi dengan tujuan Bangladesh di mana penurunan terjadi sebesar 14 ribu ton menjadi 80 ribu ton. ■



JANGAN TERLENA DENGAN KEJAYAAN KELAPA SAWIT

Karya tulis setebal 340 halaman itu diberi judul Masih Berjayakah Sawit Indonesia? Menghadapi Tuntutan Sustainability Global.



Kombinasi antara pengalaman yang panjang, pengetahuan yang mumpuni, dan visi tentang kelapa sawit berkelanjutan mendorong anggota Dewan Pembina GAPKI Joko Supriyono menuangkan pikiran-pikirannya menjadi sebuah buku. Karya tulis setebal 340 halaman itu diberi judul *Masih Berjayakah Sawit Indonesia? Menghadapi Tuntutan Sustainability Global* yang diluncurkan di Jakarta pada 4 September 2024.

Buku ini layakna renungan untuk mengingatkan kita agar tidak terlena dengan kejayaan sawit sekarang. Penulis menampilkan kisah komoditas gula yang pernah berjaya pada tahun 1920-an di mana berdiri 178 pabrik gula di Jawa. Hindia Belanda tumbuh sebagai eksportir gula terbesar di dunia. Sama seperti sawit sekarang. Namun, kejayaan gula perlahan terkikis dan digantikan oleh sawit.

Kemunduran komoditas gula inilah yang menjadi contoh nyata yang ingin diingatkan oleh penulis kepada kita semua. Tujuannya agar kisah serupa tidak

menimpa sawit. Sebagaimana kita ketahui, sawit berkontribusi sangat besar bagi Indonesia. Ekspor minyak sawit mentah Indonesia ke 160 negara lebih pada 2022 dan mencapai nilai USD 39,07 miliar atau setara Rp 600 triliun. Angka ini menggambarkan masa keemasan sawit.

Yang menarik, buku ini dibedah oleh lima narasumber, yakni Dr. Musdhalifah Machmud (Staf Ahli Kemenko Perekonomian RI), Prof. Rachmat Pambudy (Guru Besar IPB University), Firman Subagyo, (Anggota DPR RI), Eddy Martono (Ketua Umum GAPKI), dan Prof. Dr. Bustanul Arifin (Guru Besar Universitas Lampung) dengan moderator Dr. Purwadi (Ketua Yayasan Pendidikan Kader Perkebunan Yogyakarta/YKPY).

Dr. Musdhalifah Machmud mengapresiasi pikiran dan gagasan Joko Supriyono dalam buku ini yang disebutnya sebagai kontemplasi atas masalah yang terjadi di industri sawit. Selain itu, rekomendasi penyelesaian masalah dapat dijadikan pertimbangan pemerintah serta *stakeholder* sawit untuk melangkah di masa depan.

Sedangkan Prof. Rachmat Pambudy menegaskan buku ini bahan membangun pengelolaan sawit yang tepat dan merancang koneksi antara hulu hilir sawit. Beberapa masalah yang disorot antara lain tuduhan



terhadap sawit yang dikaitkan dengan label tidak sustainable.

Sayangnya, tuntutan *sustainability* ini justru tidak diajukan kepada industri minyak nabati non sawit yang secara faktual sesungguhnya menghasilkan dampak lingkungan maupun masalah keberlanjutan. Buku ini diharapkan menjadi vitamin bagi pelaku industri sawit agar tidak terlena dengan apa yang sudah dicapai sekarang. ■



20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook Seizing Opportunities Amidst Global Uncertainty

20th Anniversary Celebration IPPOC

6 - 8 NOVEMBER 2024 | BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Bali

INVITEE SPEAKERS:

- Julian Mc Gill, Managing Director, Glenauk Economics
- Thomas Mielke, Executive Director, ISTA Mielke GmbH
- Dorab Mistry, Director, Godrej International Ltd
- Nagaraj Meda, Managing Director, Transgraph
- Ryan Chen, China CNF Business Director – Oils & Oilseeds, Cargill Investments (China) Ltd.
- BV Mehta, Executive Director, The Solvent Extractors' Association of India
- Abdul Rasheed Jan Mohammad, CEO, Wesbury Group
- Alvin Tai, Soft Commodity Analyst, Bloomberg
- Alponsus Inyang, National Palm Produce Association of Nigeria (NPPAN)
- Pietro Paganini, Adjunct Assistant Professor, John Cabot University of Rome
- Mohamad Helmy Othman Basha, Chairman, Malaysian Palm Oil Board (MPOB)
- Patricio Grassini, University of Nebraska
- Joko Supriyono, Advisory Board, GAPKI
- Eddy Abdurrachman, President Director, BPDPKS*
- Andri Hadi, Ambassador of the Republic of Indonesia to the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg, and the European Union
- Rizal Affandi Lukman, Secretary General, Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)
- Edy Suprianto, Indonesian Forum for Oil Palm Seed Producers

*) to be confirmed

SESSION 1

Related Domestic Policies and Industry's Resiliency

SESSION 2

Implementation of EUDR: Opportunities & Challenges

SESSION 3

Palm Oil Industry Prospect: Regional Perspective

SESSION 4

Economic Outlook and Market Trends

PRE-CONFERENCE - WED, 6 NOV 2024

GAPKI GOLF TOURNAMENT

📍 NEW KUTA GOLF PECATU

WELCOME COCKTAIL RECEPTION

📍 TEMPLE GARDEN, WESTIN HOTEL

NETWORKING NIGHT

THU, 7 NOV 2024 📍 MANGUPURA HALL, BICC

Organized by:



Information & Registration:

📧 info@gapkiconference.org

📞 0822 1000 2110

www.gapkiconference.org

TITANIUM SPONSOR



GOLD SPONSOR



SILVER SPONSOR

PT Unggul Widiya Teknologi Lestari
Kingoya Enterprise Sdn Bhd
PT Indotruck Utama
PT Tripura Agro Persada Tbk
PT KLK Agri Servindo
PT Eagle High Plantations Tbk
PT Sampoerna Agro Tbk
Argus Media
PT Dharma Satya Nusantara Tbk

GOLF SPONSOR



WELCOME COCKTAIL SPONSOR



MEDIA PARTNER

